BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP-RI)

PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT

LAPORAN BULANAN POKJA PAPUA CERDAS

PERIODE AGUSTUS 2026

Manokwari, Papua Barat | 2026

PENGANTAR

Ringkasan Eksekutif

Sepanjang Agustus 2026, Pokja Papua Cerdas BP3OKP-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat melaksanakan 23 kegiatan, terdiri atas 5 kegiatan strategis pendidikan dan 18 kegiatan bersama/lintas Pokja, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan, penguatan kelembagaan berbasis yayasan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Orang Asli Papua di tanah Papua.

Capaian utama meliputi penjajakan kerja sama pendidikan tinggi jarak jauh, akselerasi mutu Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), sinergi lintas Pokja dalam tata kelola Dana Otonomi Khusus, serta pendampingan penyusunan dokumen perencanaan daerah yang berdampak langsung pada sektor pendidikan di wilayah pegunungan dan pesisir Papua Barat.

Pendidikan & SDM Orang Asli Papua

Akselerasi mutu pendidikan berbasis yayasan (YPK), penjajakan kerja sama pendidikan tinggi jarak jauh, dan pengembangan vokasi terapan bagi Orang Asli Papua.

Sinergi Lintas Pokja & Kelembagaan

Koordinasi bersama KPK, Kemenkeu, Bappenas, serta Pokja Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua POLHUKAM dalam tata kelola Dana Otsus.

Pembangunan Wilayah Papua Barat

Mendampingi penyusunan RPJMD/Renstra pendidikan daerah di wilayah pegunungan (Pegunungan Arfak) dan pesisir (Manokwari Selatan).

Tugas dan Fungsi Pokja Papua Cerdas

Pokja Papua Cerdas merupakan salah satu Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dibentuk berdasarkan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otsus, PP No. 106 Tahun 2021, dan Perpres No. 121 Tahun 2022, dengan fokus pada dimensi pembangunan pendidikan bagi Orang Asli Papua dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).

TUGAS

- Melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) program pendidikan dalam kerangka percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- Mengoordinasikan kegiatan strategis peningkatan mutu pendidikan, kelembagaan pendidikan berbasis yayasan, dan kerja sama pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua.
- Bersinergi dengan Pokja Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua POLHUKAM dalam kegiatan bersama/lintas Pokja yang berdampak pada sektor pendidikan.

FUNGSI

- Memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan pendidikan kepada BP3OKP untuk mendukung dimensi Papua Cerdas dalam RIPPP.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan yang didukung Dana Otonomi Khusus di wilayah pegunungan dan pesisir Papua Barat.
- Menyusun laporan berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas Pokja Papua Cerdas.

PENDAHULUAN

Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Papua Cerdas, BP3OKP-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, selama periode Agustus 2026, berdasarkan Inventarisasi Matriks Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Tahun 2026.

Kegiatan periode ini dikelompokkan menjadi dua kategori: Kegiatan Strategis Papua Cerdas (fokus dan kepemimpinan utama Pokja pada isu pendidikan, mutu SDM, dan penguatan kelembagaan pendidikan) dan Kegiatan Bersama/Lintas Pokja (dilaksanakan bersama Pokja Papua Sehat, Papua Produktif, dan/atau Papua POLHUKAM, termasuk kegiatan institusional tata kelola Dana Otsus).



5

Kegiatan Strategis
Papua Cerdas



18

Kegiatan Bersama /
Lintas Pokja



23

Total Kegiatan
Bulan Agustus 2026

BAGIAN II

Kegiatan Strategis Papua Cerdas

Kegiatan yang secara langsung berada di bawah kepemimpinan dan fokus utama Pokja Papua Cerdas, meliputi peningkatan mutu pendidikan, penguatan kelembagaan pendidikan berbasis yayasan, kerja sama pendidikan tinggi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Orang Asli Papua.

5 KEGIATAN STRATEGIS

2. Rakornis BP3OKP Akselerasi Mutu Yayasan Pendidikan Kristen (YPK)

KEGIATAN STRATEGIS PAPUA CERDAS

7 Agustus 2026 | Ruang Rapat BPP Lantai III, GKN Manokwari | Pokja Papua Cerdas



Ruang Rapat BPP Lantai III, GKN Manokwari — 7 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Pokja Papua Cerdas menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BP3OKP dalam rangka akselerasi peningkatan mutu Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Papua Barat, sebagai bagian dari penguatan tata kelola pendidikan berbasis yayasan yang berperan besar dalam layanan pendidikan bagi Orang Asli Papua di berbagai jenjang.

CAPAIAN KEGIATAN

Terjalinnya forum koordinasi awal antara Pokja Papua Cerdas dan pemangku kepentingan pendidikan berbasis yayasan untuk membahas langkah percepatan peningkatan mutu layanan pendidikan YPK di wilayah Papua Barat.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Menindaklanjuti hasil rakornis dengan penyusunan langkah teknis akselerasi mutu YPK serta pemetaan kebutuhan dukungan Dana Otsus bagi penguatan kelembagaan pendidikan berbasis yayasan.

3. Launching Chapter Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia Provinsi Papua Barat

KEGIATAN STRATEGIS PAPUA CERDAS

13 Agustus 2026 | Hotel Aston Niu, Manokwari | Pokja Papua Cerdas



Hotel Aston Niu, Manokwari — 13 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Pokja Papua Cerdas menghadiri peluncuran Chapter Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia Provinsi Papua Barat, ditandai penandatanganan Nota Kesepahaman antara IRI Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Gubernur Papua Barat meminta dukungan IRI untuk mengembangkan ekonomi hijau berbasis potensi lokal masyarakat adat, sekaligus memperkuat peran tokoh lintas agama dalam edukasi pelestarian hutan.

CAPAIAN KEGIATAN

Terjalinnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, tokoh lintas agama, dan masyarakat adat dalam gerakan perlindungan hutan berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokal, sekaligus membuka ruang edukasi publik tentang ekonomi hijau.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Pokja Papua Cerdas mengawal tindak lanjut kolaborasi edukasi lintas agama dan masyarakat adat, serta mendorong integrasi materi ekonomi hijau dan kearifan lokal ke dalam program penguatan kapasitas dan literasi masyarakat.

4. Mendorong Pembentukan PKBM di Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Penanganan ATS

KEGIATAN STRATEGIS PAPUA CERDAS

Agustus 2026 | Kabupaten Pegunungan Arfak | Pokja Papua Cerdas



Kabupaten Pegunungan Arfak — Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Pokja Papua Cerdas melakukan kunjungan koordinasi dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Pegunungan Arfak untuk mendorong pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah tersebut. Pertemuan ditandai dengan penyerahan dokumen usulan pembentukan PKBM kepada pihak terkait.

CAPAIAN KEGIATAN

Diperolehnya dukungan dan komitmen awal dari pemangku kepentingan setempat untuk menindaklanjuti pembentukan PKBM di Kabupaten Pegunungan Arfak, guna menjangkau anak-anak usia sekolah yang belum mengakses pendidikan formal.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Mendorong percepatan proses legalitas dan operasional PKBM melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Arfak dan Provinsi Papua Barat, disertai pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan sosialisasi program PKBM ke tingkat distrik/kampung.

5. Koordinasi Pembangunan SMK Negeri 3 Pariwisata Triton, Pulau Lobo — Kabupaten Kaimana

KEGIATAN STRATEGIS PAPUA CERDAS

13–20 Agustus 2026 | Kabupaten Kaimana | Papua Produktif & Papua Cerdas



Kabupaten Kaimana — 13–20 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Pokja Papua Cerdas bersama Pokja Papua Produktif mengikuti rapat koordinasi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana membahas rencana pembangunan SMK Negeri 3 Pariwisata Triton di Pulau Lobo. DPRD Kabupaten Kaimana menyatakan dukungan atas rencana pembangunan, sementara Pemerintah Daerah berkomitmen menyelesaikan administrasi pelepasan tanah adat.

CAPAIAN KEGIATAN

Terjalinnya kesepahaman antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana untuk mendukung pembangunan SMK N 3 Pariwisata Triton, sekaligus teridentifikasinya kebutuhan sinkronisasi anggaran antara Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunannya.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Mempercepat penyelesaian administrasi pelepasan tanah adat, memfasilitasi koordinasi skema pembiayaan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Daerah, serta menyusun nota kesepahaman dan jadwal pembangunan disertai penetapan penanggung jawab pada setiap tahapan.

BAGIAN III

Kegiatan Bersama / Lintas Pokja

Kegiatan yang dilaksanakan bersama Pokja Papua Sehat, Papua Produktif, dan/atau Pokja Papua POLHUKAM, serta kegiatan institusional BP3OKP terkait tata kelola Dana Otonomi Khusus yang berdampak pada program Papua Cerdas.

18 KEGIATAN BERSAMA

1. Sinkronisasi Awal Pembentukan Perseroda (BUMD) Kabupaten Pegunungan Arfak

KEGIATAN STRATEGIS PAPUA CERDAS

6 Agustus 2026 · Aula Yosmar, Kab. Pegunungan Arfak · Papua Produktif & Papua Cerdas



Aula Yosmar, Kab. Pegunungan Arfak — 6 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Pokja Papua Cerdas bersama Pokja Papua Produktif mengikuti sinkronisasi awal pembentukan Perseroda (BUMD) Kabupaten Pegunungan Arfak bersama Pemkab Pegaf, tim ahli Universitas Papua (UNIPA), dan BP3OKP. Selain sepuluh sektor usaha strategis, turut dibahas rencana pembukaan kelas jarak jauh/satelit program S1 dan S2 bekerja sama dengan Caritas University dan Universitas Doman bagi aparatur sipil negara setempat, termasuk staf PPPK.

CAPAIAN KEGIATAN

Disepakati penjajakan kerja sama pendidikan tinggi jarak jauh sebagai bagian dari peningkatan kualifikasi sumber daya manusia daerah, selaras dengan rencana pembentukan Perseroda dan penguatan kapasitas aparatur Kabupaten Pegunungan Arfak.

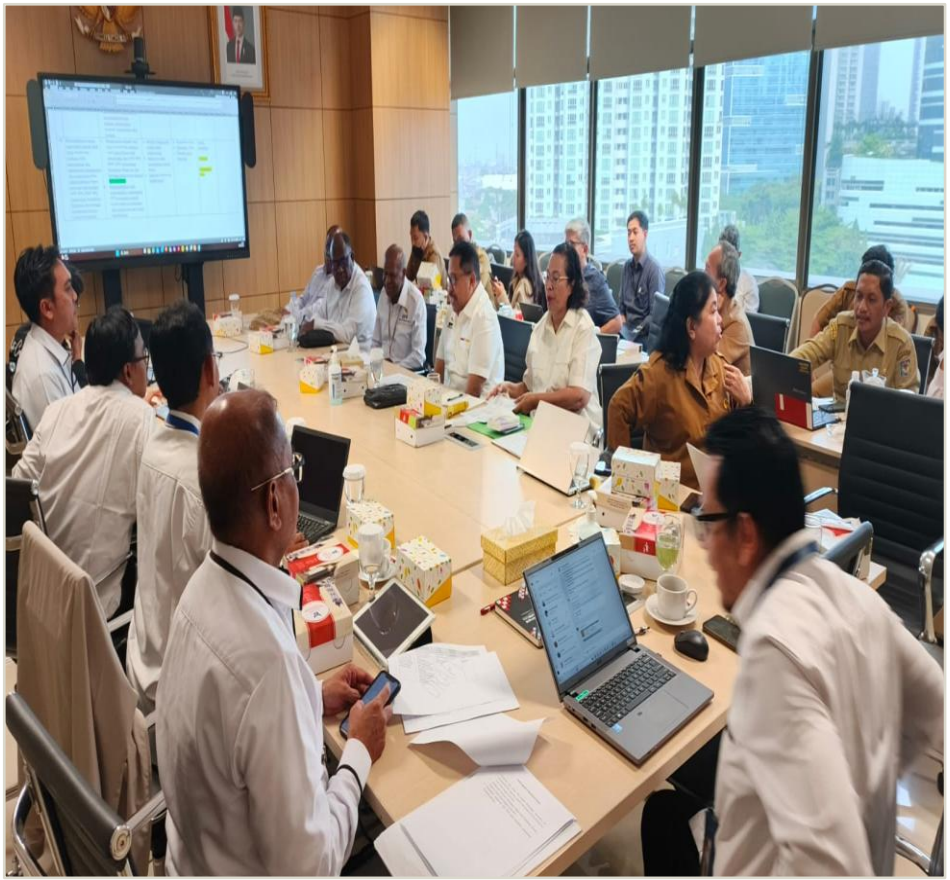
REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Menindaklanjuti komunikasi dengan Caritas University dan Universitas Doman untuk skema kelas satelit S1/S2, serta mengawal pengajuan resmi kepada LLDIKTI guna mendukung peningkatan kualifikasi SDM Kabupaten Pegunungan Arfak.

1. Rapat Koordinasi Pemantauan Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Otsus Papua

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

3 Agustus 2026 | Gedung Merah Putih KPK, Jakarta | Anggota BP3OKP + KPK, K/L, Pemda Tanah Papua



Gedung Merah Putih KPK, Jakarta — 3 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

BP3OKP bersama KPK, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, BPKP, dan LKPP membahas percepatan Perdasus OAP, penerapan tagging anggaran, dan pembentukan gugus tugas pengawal komitmen tata kelola Dana Otsus.

CAPAIAN KEGIATAN

Sinergi lintas lembaga menguat untuk tata kelola Dana Otsus yang transparan dan tepat sasaran, termasuk bagi program pendidikan dan penguatan SDM Papua.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Percepatan Perdasus OAP, tagging anggaran menyeluruh, dan pembentukan gugus tugas pengawal implementasi.

2. Audiensi Ditjen Perimbangan Keuangan — Transfer ke Daerah Manokwari Selatan

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

4 Agustus 2026 | Kementerian Keuangan RI, Jakarta | Anggota BP3OKP



Kementerian Keuangan RI, Jakarta — 4 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Mendampingi Bupati Manokwari Selatan membahas mekanisme Transfer ke Daerah dan tambahan alokasi Dana Otsus/DBH di tengah realisasi kinerja yang masih rendah.

CAPAIAN KEGIATAN

Teridentifikasi kendala utama pada kelengkapan administrasi dan dokumen RAP, bukan pada ketersediaan anggaran — termasuk bagi program sektor pendidikan.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Percepatan penyusunan RAP dan syarat salur, penerapan tagging anggaran serta rekening khusus Otsus.

3. Audiensi Kementerian ESDM — Program Papua Terang

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

5 Agustus 2026 | Kementerian ESDM, Jakarta | Anggota BP3OKP



Kementerian ESDM, Jakarta — 5 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Membahas percepatan elektrifikasi berbasis Solar Home System serta potensi energi air dan angin di kabupaten-kabupaten Papua Barat, termasuk kebutuhan energi listrik bagi fasilitas pendidikan di wilayah terpencil.

CAPAIAN KEGIATAN

Disepakati BP3OKP menghimpun usulan bupati untuk diteruskan ke Kementerian ESDM sebagai bahan program elektrifikasi wilayah terpencil, termasuk sekolah dan asrama pelajar.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Penyusunan surat resmi ke kabupaten/provinsi guna mempercepat pemerataan akses listrik bagi fasilitas pendidikan dan ekonomi produktif.

4. Rakor Teknis Perencanaan dan Pengelolaan RAPPP — Kementerian PPN/Bappenas

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

5 Agustus 2026 · Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta · Anggota BP3OKP



Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta — 5 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Membahas peran BP3OKP dalam RAPPP, pembentukan Tim Implementasi, penajaman 18 klaster PKPN, dan rendahnya kesesuaian Musrenbang Otsus dengan RAPPP, termasuk klaster pendidikan dan SDM.

CAPAIAN KEGIATAN

Disepakati pembentukan Tim Pengawal dan Tim Asistensi RAPPP di tiap kabupaten pada enam provinsi Tanah Papua.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Percepatan Tim Pendamping daerah, sinkronisasi RKPD–RAPPP hingga 100%, dan penyusunan SOP pengawasan.

5. Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II TA 2026

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

5 Agustus 2026 · Zoom (Daring) · Anggota BP3OKP



Zoom (Daring) — 5 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Wamendagri mengingatkan pemda se-Tanah Papua agar menuntaskan penyaluran Dana Otsus Tahap II secara tepat waktu dan akuntabel, termasuk alokasi bagi sektor pendidikan.

CAPAIAN KEGIATAN

Ditegaskan komitmen transparansi bersama KPK serta penguatan fungsi reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Pemda segera melengkapi syarat penyaluran Tahap II dengan pengawasan berkelanjutan.

6. Rapat Tim Pengarah Sinergi Implementasi RAPPP 2025–2029

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

10 Agustus 2026 | Menara Bappenas, Jakarta | Anggota BP3OKP



Menara Bappenas, Jakarta — 10 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Dihadiri Kementerian PPN/Bappenas, Komite Eksekutif, dan Badan Pengarah Papua se-enam provinsi untuk menyelaraskan arah kebijakan RAPPP, termasuk agenda pembangunan manusia dan kebudayaan.

CAPAIAN KEGIATAN

Sinergi lintas kementerian/lembaga menguat dalam mengawal implementasi RAPPP yang berkeadilan dan berkelanjutan.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Menghimpun dan menindaklanjuti masukan strategis lintas kementerian/lembaga, termasuk untuk klaster pendidikan dan SDM.

7. SHEK Sektor Kesehatan — RSUD Provinsi Papua Barat

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

12 Agustus 2026 | RSUD Provinsi Papua Barat, Manokwari | Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM



RSUD Provinsi Papua Barat, Manokwari — 12 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Asesmen tata kelola RSUD menemukan kekurangan 26 dokter spesialis, ketiadaan spesialis radiologi, dan serapan Dana Otsus Sehat baru ±Rp2 M dari Rp50 M akibat regulasi kaku — turut menyoroti kebutuhan pengembangan SDM medis melalui jalur pendidikan.

CAPAIAN KEGIATAN

Teridentifikasi akar masalah tata kelola BLUD dan urgensi revisi regulasi teknis sektor kesehatan, termasuk kebutuhan beasiswa pendidikan dokter spesialis bagi OAP.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Revisi Pergub/Juknis, kenaikan insentif dokter spesialis, dan penguatan program beasiswa kedokteran spesialis bagi putra-putri Papua.

8. SHEK Asesmen Pabrik Pakan Ternak — SP V, Distrik Masni

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

13 Agustus 2026 · Balai Pembibitan, SP V Distrik Masni, Kab. Manokwari · Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM



Balai Pembibitan, SP V Distrik Masni, Kab. Manokwari — 13 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Tim Pokja meninjau kesiapan pabrik pakan ternak SP V Distrik Masni, termasuk program Sekolah Peternakan Rakyat hasil kerja sama dengan IPB dan UNIPA sebagai bentuk pendidikan vokasi bagi peternak lokal.

CAPAIAN KEGIATAN

Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur pendukung pabrik pakan serta peluang penguatan program pendidikan vokasi peternakan bagi masyarakat sekitar.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Mendukung keberlanjutan program Sekolah Peternakan Rakyat sebagai model pendidikan vokasi terapan, serta koordinasi lintas sektor untuk infrastruktur pendukung.

9. SHEK Asesmen Kolam Ternak Ikan Air Tawar — Balai Benih Ikan Sentral

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

13 Agustus 2026 | Balai Benih Ikan Sentral, Provinsi Papua Barat | Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM



Balai Benih Ikan Sentral, Provinsi Papua Barat — 13 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Tim Pokja mengidentifikasi kondisi faktual Balai Benih Ikan (BBI), termasuk kekosongan posisi Kepala UPT dan kekurangan personil terlatih untuk kawasan seluas ±20 hektare.

CAPAIAN KEGIATAN

Teridentifikasinya kebutuhan peningkatan kapasitas SDM teknis perikanan darat melalui pelatihan dan pendidikan vokasi.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Mendorong penguatan SDM UPT Balai Benih Ikan melalui pelatihan teknis dan kemitraan pendidikan vokasi perikanan.

10. Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

17 Agustus 2026 | GKN, Arfai Manokwari | Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua POLHUKAM



GKN, Arfai Manokwari — 17 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Pokja Papua Cerdas bersama Pokja Papua Sehat dan Pokja Papua POLHUKAM menghadiri Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama BP3OKP Papua Barat dan KPPN, sebagai bentuk penghormatan nilai kebangsaan.

CAPAIAN KEGIATAN

Terjalinnya kebersamaan lintas Pokja dan instansi dalam memperingati Hari Kemerdekaan sebagai momentum penguatan semangat kebangsaan.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Menjadikan momentum HUT Kemerdekaan sebagai penguat nilai kebangsaan dalam program pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda Papua.

11. Lokakarya Percepatan Dana Otsus & DTI Tahap II serta RAP Awal 2027

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

18–21 Agustus 2026 · GKN, Arfai, Manokwari · Anggota BP3OKP, Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua POLHUKAM



GKN, Arfai, Manokwari — 18–21 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Membahas percepatan penyaluran Dana Otsus/DTI enam provinsi Papua serta RAP Awal 2027 melalui interoperabilitas SIPPP–SIKD–SIPD, termasuk alokasi sektor pendidikan; realisasi Tahap II baru 42,58%.

CAPAIAN KEGIATAN

Kesepahaman soal syarat salur, penggunaan SILPA, dan percepatan penyaluran via KPPN (SLA 1–2 hari kerja), termasuk untuk program pendidikan Otsus.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Akselerasi RAP Perubahan di SIKD dan penyampaian Laporan Tahunan Otsus ke BP3OKP/DPRP/MRP.

12. Audiensi — Menerima Aspirasi Masyarakat Suku Sebiar

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

18 Agustus 2026 | Ruang Rapat BPP Lantai III, GKN Manokwari | Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua POLHUKAM



Ruang Rapat BPP Lantai III, GKN Manokwari — 18 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menerima audiensi dan menampung aspirasi dari perwakilan masyarakat suku Sebiar terkait berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk akses pendidikan bagi masyarakat adat.

CAPAIAN KEGIATAN

Tercatatnya aspirasi masyarakat suku Sebiar sebagai bahan masukan bagi perencanaan program percepatan pembangunan Otsus.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Menindaklanjuti aspirasi masyarakat suku Sebiar, termasuk kajian kebutuhan akses pendidikan dan layanan dasar bagi komunitas adat setempat.

13. Sesi Pleno Pendampingan Evaluasi Musrenbang Otsus 2026

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

19 Agustus 2026 | Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat | Anggota BP3OKP, Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM



Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat — 19 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Keselarasan usulan daerah dengan RAPPP baru mencapai 57,49% secara nasional; 11 daerah belum mengunci Berita Acara di SIPPP, termasuk sejumlah usulan program pendidikan daerah.

CAPAIAN KEGIATAN

Disepakati pendekatan penyelarasan solutif tanpa membongkar struktur RKPD yang telah final.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Desk pendampingan teknis selama tiga hari dan penguncian Berita Acara di SIPPP, termasuk untuk klaster pendidikan.

14. Tim Asistensi — Pendampingan Evaluasi Musrenbang Otsus 2026

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

20–21 Agustus 2026 | Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat | Anggota BP3OKP, Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM



Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat — 20–21 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Penajaman 469 sub-kegiatan Musrenbang; 262 sub-kegiatan (55,86%) berhasil diselaraskan dengan RAPPP.

CAPAIAN KEGIATAN

Fakfak, Teluk Bintuni, dan Kaimana mencapai keselarasan 100%; turut diusulkan inovasi layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Sub-kegiatan belum selaras dimasukkan ke lampiran usulan revisi RAPPP; pendampingan intensif bagi kabupaten tertinggal, termasuk sektor pendidikan.

15. Rakor Kabupaten Manokwari — Keselarasan RPJMD dengan RAPPP 2025–2029

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

24 Agustus 2026 | Kantor Bappeda Kabupaten Manokwari | Anggota BP3OKP, Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM



Kantor Bappeda Kabupaten Manokwari — 24 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Keselarasan usulan Kab. Manokwari terhadap RAPPP baru 36,04%, berisiko nol alokasi Dana Otsus karena RPJMD/RKPD belum terkunci di SIPD — turut berdampak pada alokasi program pendidikan daerah.

CAPAIAN KEGIATAN

Disepakati percepatan penguncian data statistik sektoral (DSSD 2020–2023) dan 48 dokumen Renstra OPD, termasuk Renstra Dinas Pendidikan.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Penerbitan SK Bupati untuk DSSD, penyeragaman jumlah OPD, dan target penguncian dokumen sebelum akhir Agustus 2026.

16. Rakor Evaluasi Otsus & Pendampingan Renstra, RPJMD, RAP — Manokwari Selatan

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

26 Agustus 2026 | Setda Kabupaten Manokwari Selatan (Ransiki) | Anggota BP3OKP, Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM



Setda Kabupaten Manokwari Selatan (Ransiki) — 26 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Mendampingi penyusunan dokumen perencanaan Manokwari Selatan yang bersama Pegunungan Arfak memerlukan akselerasi intensif sebelum tenggat SIKD 31 Agustus 2026.

CAPAIAN KEGIATAN

Pimpinan OPD menyatakan kesiapan dan komitmen kolektif bekerja intensif bersama tim pendamping provinsi, termasuk OPD pendidikan.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Akselerasi draf Renstra/RPJMD berbasis klaster bidang dan finalisasi penguncian SIKD.

17. Desk Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan — Manokwari Selatan

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

26 Agustus 2026 | Setda Kabupaten Manokwari Selatan (Ransiki) | Anggota BP3OKP, Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM



Setda Kabupaten Manokwari Selatan (Ransiki) — 26 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Desk pendampingan menyamakan persepsi dan menyinkronkan program daerah dengan anggaran Otsus, menegaskan tidak boleh ada program tanpa anggaran.

CAPAIAN KEGIATAN

Disepakati program di luar alokasi Otsus utama dapat disiasati melalui sumber pendanaan alternatif yang sah.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

OPD menuntaskan dokumen pada hari yang sama; target penetapan RPJMD/RKPD akhir pekan berjalan.

18. Pendampingan Lanjutan Penyusunan Renstra, RPJMD, serta RAP Otsus 2027

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

27–28 Agustus 2026 | Ruang Rapat Bappeda Provinsi Papua Barat | Anggota BP3OKP, Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM



Ruang Rapat Bappeda Provinsi Papua Barat — 27–28 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Kelanjutan pendampingan Manokwari Selatan, berfokus menyinkronkan program daerah dengan anggaran Otsus agar perencanaan terintegrasi dengan sistem — Pokja Papua Cerdas turut serta bersama Pokja Papua Sehat dan Papua Produktif.

CAPAIAN KEGIATAN

Ditegaskan kembali prinsip sinkronisasi program-anggaran dan kepatuhan pada sistem interoperabilitas.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Penyesuaian data sesuai sistem dan target penetapan RPJMD/RKPD agar input RAP3 dapat dilanjutkan.

Rekomendasi & Tindak Lanjut Prioritas

1. Mengawal peningkatan mutu pendidikan berbasis yayasan (YPK) serta penguatan tata kelola kelembagaan pendidikan di Papua Barat.

2. Mendorong kerja sama pendidikan tinggi jarak jauh (Caritas University & Universitas Doman) untuk peningkatan kualifikasi aparatur dan masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak.

3. Mengawal program beasiswa dokter spesialis dan penguatan SDM kesehatan sebagai bagian dari sinergi Papua Cerdas dan Papua Sehat.

4. Mendukung model pendidikan vokasi terapan (Sekolah Peternakan Rakyat, pelatihan teknis perikanan) hasil kerja sama dengan IPB dan UNIPA.

5. Mendorong percepatan penguncian RPJMD, Renstra, dan RKPD — termasuk Renstra Dinas Pendidikan — di Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak.

6. Melanjutkan koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu, dan KPK untuk penguatan tata kelola Dana Otsus yang transparan dan berdampak bagi kemajuan pendidikan Orang Asli Papua.

Demikian Laporan Bulanan Pokja Papua Cerdas BP3OKP-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat periode Agustus 2026 disusun sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut, serta bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP)
Perwakilan Provinsi Papua Barat — Pokja Papua Cerdas

Terima Kasih

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

LAPORAN BULANAN

POKJA POLHUKAM

AGUSTUS 2026



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

05 AGUSTUS 2026

RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN TOKOH/PERWAKILAN BOMBERAI RAYA, SEKRETARIS DAP DOBERAI, KETUA ASOSIASI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN), WAKIL GUBERNUR PB, SEKDA PB, PIMPINAN OPD MEMBAHAS RUU MASYARAKAT ADAT

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

PERMASALAHAN

1. UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang bersifat seragam dan sentralistik telah merusak tatanan adat dan prinsip hidup Orang Asli Papua di kampung yang sebenarnya mempunyai hak otonomi kampung yang tumbuh dari bawah berdasarkan hukum adat setempat.
2. Kebijakan Otonomi Simetris mengatur dan mengurus pemerintahan sampai pada level kampung sehingga tidak memberikan ruang bebas kepada masyarakat adat dalam pemberdayaan. kampung berdasarkan hak asak usul dan otonomi kampung.
3. Dibalik kebijakan negara tentang sertifikasi tanah adat terselubung penyerobotan tanah masyarakat adat bagi kepentingan individu, kelompok oligarki yang hedonisme menghendaki kehidupan materialistik.
4. Kapitalisasi Tanah adat oleh pemodal, kelompok kepentingan, penguasa dengan dalih masa depan dan kesejahteraan Orang Asli Papua hanya retorika belaka yang membuat keresahan masyarakat adat.
5. Pemetaan batas hak ulayat marga/Keret/fam di setiap kampung belum dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat secara maksimal karena keterbatasan finansial untuk pemetaan hak ulayat dimaksud.
6. Belum ada produk hukum nasional atau Undang-Undang tentang Masyarakat Adat sehingga hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adatnya selalu menjadi permasalahan regional dan nasional dengan pihak investor yang berinvestasi di daerah

KEGIATAN STRATEGIS

1. Penyampaian materi masyarakat adat oleh wakil gubernur Papua barat Mohammad Lakutsni, S.H., M.Si yang menekankan pada perlindungan, penghormatan, dan pelestarian adat, tanah adat dan hutan adat.
2. Penyampaian materi masyarakat adat oleh Rektor UNIPA Prof. Dr. Hugo Warami, S.Pd., M.Hum yang menekankan pada peninjauan kembali istilah masyarakat hukum adat, masyarakat adat agar dapat ditetapkan dalam RUU Masyarakat Adat.
3. Penyampaian materi masyarakat adat oleh perwakilan wilayah adat bomberai raya Dr. Ismail Sirfefa, S.Sos., M.H yang menitik beratkan pada Eksistensi Masyarakat Bomberai, hak atas tanah adat, hutan adat dan laut adat serta peran lembaga adat dan peradilan adat dalam masyarakat.
4. Penyampaian materi masyarakat adat oleh sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai Sakeos Horota lebih menyoroti tentang ketidak seriusan pemerintah pusat terhadap produk hukum nasional (UU Masyarakat Adat) dan hak-hak masyarakat adat.
5. Penyampaian materi masyarakat adat oleh Sekretaris Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Papua Barat Daya yang menjelaskan tentang dinamika masyarakat adat dan perbedaan serta persamaan masyarakat hukum adat dan masyarakat adat.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

REKOMENDASI

1. Proses Pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat harus memperhatikan politik hukum dan konsideran menimbang dari aspek pertimbangan antropologis.
2. Melibatkan stakeholder, tokoh-tokoh kunci yang paham tentang hukum adat, budaya daerah, peran lembaga adat dan peradilan adat terhadap masyarakat adat serta hak-hak masyarakat adat secara komprehensif.
3. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat secara periodik wajib dijadikan substansi inti dalam UU masyarakat adat.





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

06 AGUSTUS 2026

FESTIVAL RAIMUTI SEBAGAI STIMULAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PESISIR DAN BUDAYA BAHARI YANG BERIMPLIKASI TERHADAP STABILITAS KEAMANAN DAN KETAHANAN DAERAH YANG MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL KETAHANAN NASIONAL DEMI TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

PERMASALAHAN

1. Potensi sumberdaya pariwisata pesisir pantai Raimuti untuk pengembangan wisata bahari dan budaya bahari daerah sangat tersedia, namun terbatas pada peluang tata kelola seperti belum adanya dokumen kebijakan dan penyediaan infrastruktur pariwisata yang memadai.
2. Festival Raimuti 2026 yang telah digelar di sepanjang pantai Kodam tanggal 6 Agustus adalah starting point untuk memperkenalkan rencana pengembangan pariwisata bahari oleh Kodam XVIII Kasuari dengan beberapa kegiatan yang bernuansa wisata bahari, namun belum ditunjang secara lengkap dengan kajian AMDAL, prasarana dan sarana pariwisata serta carrying capacity guna menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.
3. Festival Raimuti 2026 untuk rencana pengembangan pariwisata bahari dan budaya bahari belum dilakukan secara terpadu dengan melibatkan OPD teknis dan stakeholders untuk menata kembali lingkungan, alam, budaya dan kreativitas manusia sebagai satu kesatuan dan unsur utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan belum didesain untuk dikelola secara baik agar dapat memberi kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan green economy/ blue economy dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.

KEGIATAN STRATEGIS

1. Sambutan Pangdam XVIII Kasuari berorientasi pada upaya pengembangan pariwisata pesisir dan budaya bahari dalam rangka menyongsong HUT RI ke 81 yang tentu berimplikasi terhadap stabilitas keamanan dan ketahanan daerah yang merupakan bagian integral ketahanan nasional demi terlaksananya pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Sambutan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan lebih mengarah pada pariwisata olah raga (lomba dayung, volly pantai, sky air, dll) untuk mempersiapkan bibit unggul menyongsong pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) pada setiap musim kompetisi nasional maupun internasional. Disisi lain kata gubernur bahwa lingkungan hidup perlu dijaga dan dipelihara keindahannya, untuk itu pulau raimuty dipandang perlu dihijaukan kembali dengan penanaman kembali pohon manggrove guna mencegah abrasi dan kerusakan soft coral dan hard coral.
3. Kegiatan lomba dayung pria dan wanita diikuti juga peserta dari Jayapura, Serui, Sorong, Fakfak, Kaimana, dan Pegunungan Arfak yang berimplikasi terhadap rasa solidaritas sosial, kebersamaan, rasa senasib dan seperjuangan, persatuan dan kesatuan komunitas dayung yang diharapkan dapat membangkitkan semangat daya juang yang tinggi untuk menjadikan lomba dayung tidak sekedar sebagai olah raga hobi dalam momentum tertentu yang sifatnya musiman sementara, namun keterampilan dari para peserta dayun perlu dibina dengan baik untuk mencintai budaya bahari dan menjaga kelestarian pesisir dan laut secara berkelanjutan.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

REKOMENDASI

1. Disarankan agar kebijakan tata kelola sumber daya pariwisata raimuti perlu mendapat atensi pemerintah daerah provinsi papua barat dan pemerintah daerah kabupaten manokwari karena terletak di jantung kota Manokwari sebagai pesona pariwisata yang mempunyai daya tarik munculnya rantai bisnis masyarakat untuk meningkatkan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran serta masalah sosial.
2. Pariwisata adalah multy player effect function sehingga dipandang perlu tata kelolanya terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan perguruan tinggi untuk mendorong percepatan pengembangan pariwisata raimuti yang akan memberikan ruang bagi hadirnya usaha-usaha pariwisata untuk kesejahteraan dan perbaikan ekonomi rakyat.
3. Disarankan agar Kabupaten Manokwari dapat menyediakan Dokumen Pariwisata berupa RIPPARKAB, carrying capacity (daya dukung dan daya tampung) serta menentukan site/spot wisata selam, diving, snorkeling, jet sky, scuba sebagai obyek wisata yang eksotisme agar menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara dan domestik serta setiap visitor yang berkunjung di kawasan raimuti.





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

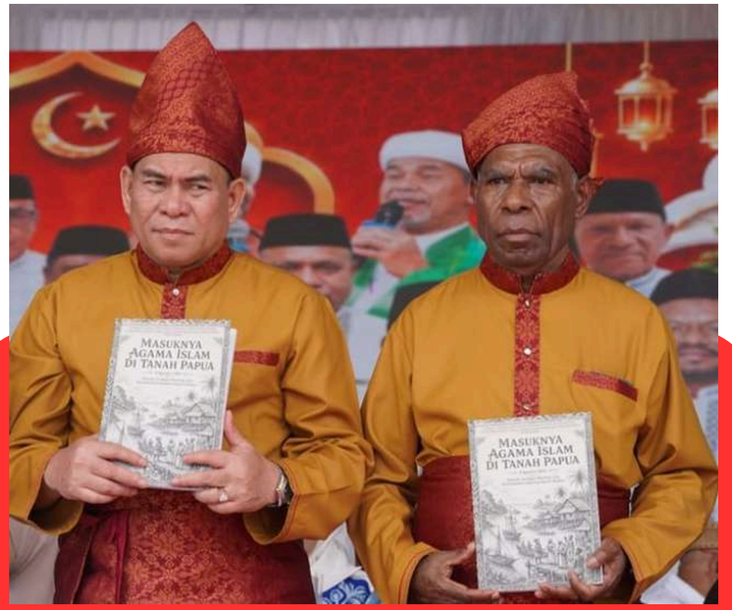
BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

7-8 AGUSTUS 2026

PERINGATAN 666 TAHUN MASUKNYA ISLAM DI TANAH PAPUA

PERMASALAHAN

1. Perayaan dan Peringatan 666 Tahun Masuknya Agama Islam di Tanah Papua yang ditetapkan tanggal 8 Agustus 2026 yang diikuti seluruh umat beragama (Islam, Katolik, Protestan) di Kota Pala Fakfak adalah wujud harapan Muslim Papua dan umat Islam Nusantara serta merupakan ekspresi ungkapan hasil penelitian sejarah perjalanan Islam yang sangat lama kurang lebih 32 tahun, penelitian ini dilakukan terus menerus tanpa mengenal lelah yang dimulai oleh beberapa ormas Islam, pemerintah daerah provinsi Papua barat yang dipimpin wakil gubernur Drs. Rahimin Katjong, M.Pd (almarhum), dilanjutkan bupati Fakfak saat kepemimpinan (Matondang, Wahidin Puarada, Muhammad Uswanas) namun belum berhasil menyusun sebuah buku Masuknya Islam di Tanah Papua, karena keterbatasan sarana dan prasarana penelitian, biaya penelitian untuk menjangkau situs-situs sejarah Islam di tanah Papua.
2. Menindak lanjuti perjuangan penelitian yang belum membuahkan hasil sebuah penulisan ilmiah, maka Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat berinisiatif melanjutkan dan melakukan penelitian kembali dan seminar masuknya Islam di Tanah Papua oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat yang dibiayai Pemerintah Daerah Provinsi Barat melalui Sekda Provinsi Papua Barat Drs. Ali Baham Temongmre pada tahun 2025 walaupun dengan biaya yang terbatas, namun berhasil menerbitkan sebuah karya ilmiah perjalanan Islam di Tanah Papua yang berjudul MASUKNYA AGAMA ISLAM DI TANAH PAPUA 8 Agustus 1360, Sejarah, Jaringan Maritim dan Pembentukan Identitas Sosial Budaya.
3. 666 Tahun Masuknya Agama Islam di Tanah Papua yang digelar tanggal 8 Agustus 2026 adalah bukti autentik sejarah bangsa Indonesia, perayaan dan peringatannya sangat semarak diikuti kurang lebih 10.000 orang tamu/ undangan dan kelompok penggembira dari berbagai agama yang secara ikhlas mengambil bagian, namun dibalik perayaan yang Akbar dan mulia tersebut masih terjadi perbedaan pandangan yang kontradiktif di tataran Muslim Papua tentang kalimat Masuknya Agama Islam di Tanah Papua, dengan kalimat Kembalinya Agama Islam di Tanah Papua





KEGIATAN STRATEGIS

1. Melakukan Ziarah ke Pusara Syekh Abdul Ghafar Kampung Gar Lama, Napak Tilas Lokasi Pertama beliau berinteraksi dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial di kampung tersebut sebagai sentra dakwah Islamiyah pertama di Jazirah Onin.
2. Menggali Sejarah Masuknya Islam di Tanah Papua . Berbasis Situs, Artefak, Sumber Manuskrip, Tutur Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama guna memperoleh data dan informasi akurat dalam Penyusunan Sejarah Masuknya Islam di Tanah Papua, dan telah berhasil diterbitkan bukunya dan didistribusikan kepada seluruh pejabat dan tamu undangan serta seluruh masyarakat yang hadir dalam acara Puncak Peringatan 666 Tahun Masuknya Agama Islam di Tanah Papua
3. Peringatan 666 Tahun Masuknya Islam di Tanah Papua diawali dengan sambutan-sambutan yang dimulai dari Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP, kemudian disusul Wakil Gubernur Papua Barat H. Mohamad Lakotani, S.H., M.Si, Gubernur Papua. Semua sambutan sangat bervariasi, namun inti acara puncak peringatan dimaksud adalah 1). Menghargai dan menghormati nilai-nilai sejarah masuknya agama&agama samawi di Tanah Papua; (2). Membangun kebersamaan kehidupan umat beragama, menciptakan harmoni sosial, membangkitkan semangat toleransi demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia; (3). Bahwa sejarah masuknya Agama Islam, Katolik dan Protestan di Tanah Papua harus diabadikan melalui kebijakan kepala daerah dalam membuat produk hukum daerah tentang kurikulum/muatan lokal sejarah masuknya agama-agama samawi di Tanah Papua untuk ditransmisikan kepada anak-anak sekolah, generasi hari ini, dan generasi mendatang.





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

REKOMENDASI

1. Disarankan agar ada koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimediasi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) RI Perwakilan Papua Barat untuk membahas tentang Rencana Pengembangan Taman Hiburan Rakyat (THR) di Pantai Reklamasi Fakfak yang lebih representatif dan akomodatif.
2. Mempertegas usulan dan saran Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, agar momentum peringatan masuknya agama Islam di Tanah Papua yang digelar pada tanggal 8 Agustus 2027 mendatang dan seterusnya setiap tahun kiranya Panitia Penyelenggara dan Pemda kabupaten Fakfak dapat mengundang semua gubernur dan bupati/walikota se- Tanah Papua dan kementerian/lembaga terkait untuk memanfaat momentum peringatan tersebut sebagai ajang dan trigger silaturahmi serta dialog percepatan pembangunan dan otonomi khusus di Tanah Papua.
3. Disarankan kepada Gubernur Papua Barat dan Bupati Fakfak memerintahkan OPD Teknis yang membidangi Mental Spiritual untuk dapat memperbanyak Buku Masuknya Islam di Tanah Papua dan didistribusikan kepada pihak akademik, sekolah/madrasah, dan masyarakat luas agar mengetahui atau memahami sejarah tersebut





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

8 AGUSTUS 2026

PERTEMUAN ANGGORA PENGURUS LAMPUKITA DENGAN BP3OKP RI PERWAKILAN PROV. PB

PERMASALAHAN

1. Kepedulian pemerintah daerah terhadap bidang Seni dan Budaya Daerah sebagai identitas dan jati diri Orang Asli Papua (OAP) serta akulturasi budaya musik yang merupakan kegemaran Orang Asli Fakfak untuk menyalurkan hobi dan bakat di dunia kesenian semakin pudar karena tidak dijaga dan dilestarikan Dewan Adat, Pemerintah Daerah setempat, maupun Dewan Kesenian Daerah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Fakfak.
2. Kecenderungan dan snomi masyarakat, para seniman dan budayawan daerah untuk mengangkat kembali dan menggali nilai-nilai budayavdaerah di Fakfak sangat tinggi. namun keterbatasan prasarana/sarana penunjang berupa alat-alat musik agar memicu generasi muda untuk berkreasi, berekspresi menyalurkan bakat, hobi bernyanyi sebagai jasa hiburan yang berimplikasi terhadap terciptanya lapangan kerja baru yang bermanfaat mempunyai nilai ekonomi dan nilai sosial budaya kurang mendapat atensi pemerintah daerah setempat.
3. Banyak seniman dan budayawan senior di Fakfak yang merindukan agar bakat dan ketrampilan mereka sebagai musisi, penyanyi profesional bisa disalurkan kepada generasi muda, namun tidak ada tempat khusus untuk melakukan pelatihan sebagai penyanyi dan musisi profesional serta belum adanya peralatan musik yang memadai.

KEGIATAN STRATEGIS

1. Sharing pendapat dan diskusi tentang upaya pengembangan minat dan bakat para seniman dan budayawan yang belum dilirik dan dijama pemerintah daerah untuk mendorong inovasi dan kreativitas Generasi Muda Papua di Fakfak yang selama beberapa dekade terpendam dan belum digali. diangkat sebagai modal sosial.
2. Sharing pendapat dan diskusi tentang Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kolaborasi Dunia Seni Budaya dengan Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM) dalam setiap even daerah yang bernuansa lokal, regional dan nasional dengan tujuan terciptanya peluang pasar bagi ibu-ibu pegiat UMKM di daerah.
3. Mendorong kerjasama lintas daerah melalui aksesibilitas jasa transportasi laut yang saling menguntungkan dengan cara operasionalisasi pelayaran kapal penumpang milik PT. PELNI dengan jalur pelayaran dari arah selatan (Merauke sampai Jayapura) pulang - pergi agar dapat memberdayakan ibu-ibu UMKM untuk saling menukar pengalaman, mempermudah rantai bisnis, dapat memperkenalkan/ mempromosikan hasil produk daerah, dan selalu tersedia ruang bisnis untuk memasarkan produk unggulan kekhasan daerahnya.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

REKOMENDASI

1. Disarankan agar pemerintah daerah setempat melalui dinas teknis dapat menyediakan beberapa perangkat alat musik yang lengkap untuk dibagikan kepada group-group band yang ada atau terbentuk dan Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Fakfak.
2. Disarankan agar pemerintah daerah dapat menyediakan tempat khusus untuk dimanfaatkan para seniman dan budayawan senior guna mengedukasi dan membina generasi muda Papua yang punya bakat, talenta dan hobi di dunia tarik suara untuk bernyanyi dan ingin berkembang sebagai penyanyi dan musisi profesional di daerah dan nasional.
3. Disarankan agar dalan Rapat Kerja para gubernur dan Bupati/Walikota dapat disepakati masing-masing dewan kesenian, kelompok musisi dan group band yang telah terbentuk di daerah menjadi tanggung jawab Kepala Daerah untuk mendukung perjuangan seniman, budayawan dan generasi muda agar bermanfaat bagi daerah.
4. Disarankan kepada para Kepala daerah kiranya dapat berkolaborasi dan berkoordinasi memperjuangkan trayek perjalanan kapal penumpang PT. PELNI di Kementerian Perhubungan agar dapat membantu ibu-ibu UMKM dalam melariskan produk dan hasil karya mereka melalui bisnis diatas kapal antar daerah dari wikayah selatan (Merauke) sampai ke wiayah utara (Jayapura) agar rantai bisnis mereka berkembang dan berhasil guna dalam perbaikan ekonomi rumah tangga.







KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

12 AGUSTUS 2026

ASESMEN, EVALUASI FASILITAS KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS DI RSUD PROVINSI PAPUA BARAT

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

PERMASALAHAN

1. Dari Aspek Politik Hukum, bahwa Kebijakan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan belum disosialisasikan kepada Orang Asli Papua (OAP) di setiap daerah.
2. Dalam pertemuan BP3OKP dengan Direktur RSUD, bersama tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat dilaporkan bahwa banyak keluhan Pegawai Negeri Sipil dan masyarskat bahwa Pelayanan Kesehatan terkait Rujukan untuk berobat keluar daerah bagi OAP yang menggunakan dana otonomi khusus perlu ditinjau kembali jenis regulasi apa yang mengatur tata kelolanya sehingga masih banyak keluhan masyarakat yang merasakan tidak puas.
3. Peralatan Medis untuk pelayanan pasien cukup lengkap namun jika dikomperssi dengan ketersediaan tenaga medis, dan tenaga kesehatan lainnya seperti mantri, bidan, perawat yang dibutuhkan membantu dokter sangat terbatas sehingga belum berimbang dalam pelayanan orang sakit atau pasien yang akan ditangani.
4. Keterbatasan dana/biaya operasional tenaga medis, perawat dan staf P3K dalam menunjang aktivitas administrasi Rumahan Sakit sehingga membutuhkan hadirnya Reventing Governace di Rumah Sakit Umum Daerah sebagai suatu leading sektor ekonomi yang mampu menata keuangan Rumah Sakit dan dapat menunjang kelancaran dan keberlanjutan tugas/fungsi Rumah Sakit apabila belum ada ketersediaan dana otonomi khusus untuk akselerasi akses pelayanan publik terutama Orang Asli Papua.

KEGIATAN STRATEGIS

1. Anggota Pokja Polhukam atau Papua Damai (Dr. Ismail Sirfefa, S.Sos., M.H melaksanakan tugas partisipatif dan kemitraan bersama Anggota Pokja Papua Sehat, Anggota Pokja Papua Cerdas. mendampingi Ketu BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat (Ibu Irine Manibui, S.H., M.Kn) melakukan Asesmen dan Evaluasi Akselerasi Akses Layanan Management Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat, inventarisasi dan identifikasi prasarana dan sarana kerja RSUD, permasalahan aktual yang dihadapi tetaga medis dan tenaga perawat dalam pelayanan pasien.
2. Rapat Kerja antara BP3OKP, Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat dr. Arnold, dr. Irianto Ramandei, dan beberapa dokter atau tenaga medis lainnya di ruang rapat RSUD Prov. PB lantai 2 membahas tentang Perbaikan Tata Kelola diantaranya manajemen RSUD, Reinventing Governance untuk Leading Sektor Ekonomi Rumah Sakit dan Regulasi Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua Barat dan Derivatnya berupa Peraturan Gubernur, Kepusan Gubernur sampai pada Petunjuk Teknis.
3. Mendiskusikan penjabaran Peraturan Daerah Khusus Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Khusus Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan. Dalam diskusi diminta Pemerintah Daerah Provinsi Papua dapat membuat Petunjuk Teknis atau Pedoman Teknis tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

REKOMENDASI

1. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat wajib mensosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan di setiap Kabupaten terutama disosialisasikan kepada Orang Asli Papua.
2. Regulasi Rujukan bagi pasien yang hendak berobat dapat dipermudah bagi Orang Asli Papua sesuai tingkat jenis penyakit yang diderita dengan pelayanan gratis dan memuaskan bagi pasien
3. Disarankan agar masing-masing bidang yang menangani jenis penyakit namun tenaga medisnya terbatas dapat ditambah tenaga medis minimal setiap bidang yang menangani jenis penyakit yang berbeda dua orang tenaga medis dan satu orang dokter spesial agar pelayanan menuju proses penyembuhan lebih tepat dan cepat.











KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

17 AGUSTUS 2026

UPACARA PERINGATAN HUT RI KE-81
DI GEDUNG KEUANGAN NEGARA RI
WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

PERMASALAHAN

1. Upacara Peringatan HUT RI Ke 81 yang diikuti Keluarga Besar Gedung Keuangan Negara bersama Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) di depan halaman Kantor GKN Jalan Brig.Jend. Purw. Abraham O. Atururi Arfai - Manokwari, belum sempat diikuti seluruh Anggota Pokja BP3OKP karena alasan transportasi pagi.

2. Upacara Peringatan HUT RI Ke 81 tanggal 17 Agustus 2026 di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat sebagaimana biasa yang semestinya Anggota BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat (Ibu Ireni Manibui, S.H., M.Kn) secara struktural dan jenjang organisasi harus diundang untuk hadir dalam upacara tersebut, namun Panitia Penyelenggara lalai dan tidak mengundang dengan hormat, waupun Anggota Pokja dan Staf BP3OKP sudah berkoordinasi dengan Bagian Protokuler Kantor Gubernur.

KEGIATAN STRATEGIS

1. Upacara Bendera 17 Agustus 2026 dalam rangka memperingati HUT RI Ke 81 yang diikuti Keluarga Besar Gedung Keuangan Negara dan BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat di depan halaman Kantor/Gedung Keuangan Negara penuh hening, kekeluargaan, sederhana dan hikmat.

2. Pasca Upacara dimaksud dilanjutkan dengan diskusi lepas tentang Upaya Strategi Pokja Polhukam (Papua Damai) Merajut Entitas Kultural sebagai Satu Kesatuan Dalam Sistem Sosial Nasional Indonesia Diskusi ini dimaksudkan agar BP3OKP dapat didanai secara memadai untuk membangun harmoni sosial, persatuan dan kesatuan entitas kultural untuk cara pandang dan wawasan yang seragam tentang Tujuan Otonomi Khusus yang diharapkan dapat menjangkau Entitas Kultural di 7 Kabupaten se-Papua Barat.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

REKOMENDASI

Disarankan agar sebelum memasuki pertengahan bulan Agustus setiap tahun, maka untuk mengantarkan Peringatan HUT Negara RI diwajibkan setiap Lembaga/Kementerian, OPD, ORMAS, Perguruan Tinggi dan Institusi lainnya dapat melakukan Dialog Interaktif di tempat kerjanya atau dalam masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan, Hakekat dan Tujuan Otonomi Khusus agar semua orang dan setiap Alih Generasi dapat memaham







KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

18 AGUSTUS 2026

BERTEMPAT DI RUANG RAPAT BP3OKP, DILAKSANAKAN KEGIATAN MENGIKUTI PAPARAN KOMITE EKSEKUTIF BPP, DR. VELIX WANGGAI, MENGENAI AKSELERASI PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS SE-TANAH PAPUA.

PERMASALAHAN

1. Kebijakan lahirnya Komite Eksekutif BP3OKP adalah suatu diskresi Presiden Republik Indonesia. Komite Eksekutif ini bertugas membantu BP3OKP untuk melaksanakan Fungsi SHEK dengan Kementerian/ Lembaga dari Pusat sampai Daerah, namun dalam tataran pelaksanaannya Komite Eksekutif belum pernah melakukan rapat koordinasi dengan BP3OKP untuk menyamakan visi dan misi serta Penetapan Pembagian Batas Kewenangan, Mekanisme Kerja antara BP3OKP dengan Komite Eksekutif agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.
2. Paparan Materi Ketua Komite Eksekutif BP3OKP tentang Akselerasi Pembangunan Otonomi Khusus di Tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Barat masih bersifat retorika dan wacana belaka, belum dirapatkan dan dibicarakan secara baik dengan BP3OKP bagaimana tataran implementasinya di daerah berdasarkan RIPPP dan RAPPP serta kebutuhan daerah yang akan direkomendasikan untuk diprogramkan kedepan.

KEGIATAN STRATEGIS

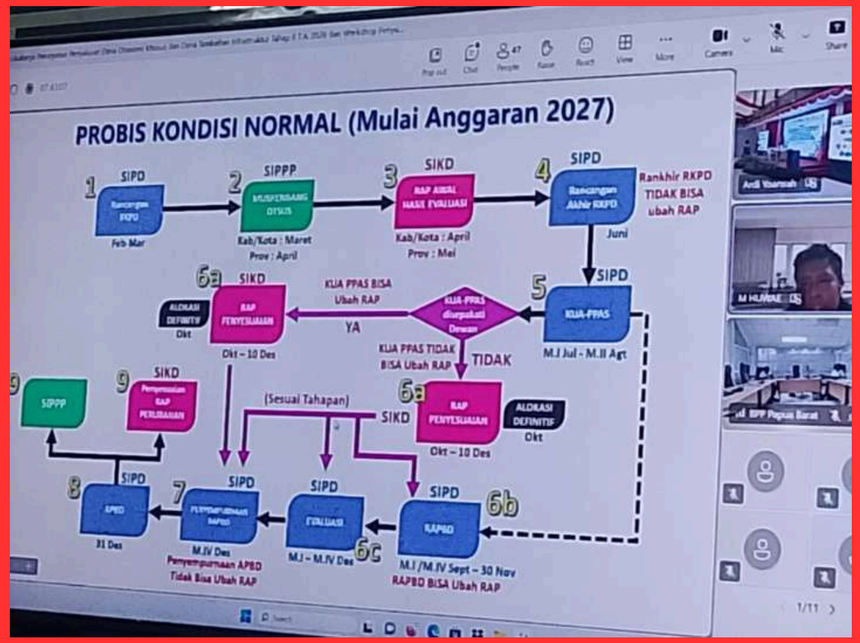
1. Mengikuti Paparan Komite Eksekutif BP3OKP Provinsi Papua Barat (Dr. Felex Wanggai) tentang Akselerasi Pembangunan Otonomi Khusus) se- Tanah Papua yang materinya ditayangkan pada 28 Agustus 2026. Materinya sangat baik untuk dilaksanakan secara kolaboratif dan koordinatif dengan Kementerian/ Lembaga, Instansi teknis pengampu dana otonomi khusus terutama untuk mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus bagi tiga pilar utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif serta Kebijakan Nasional Asta Cipta
2. Diskusi internal antar Pokja Papua Sehat. Papua Cerdas, Papua Prodiktif dan Papua Polhukam terkat Pengembangan tugas fungsi yang belum berjalan sesuai sampai ke daerah-daerah yang tergolong Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

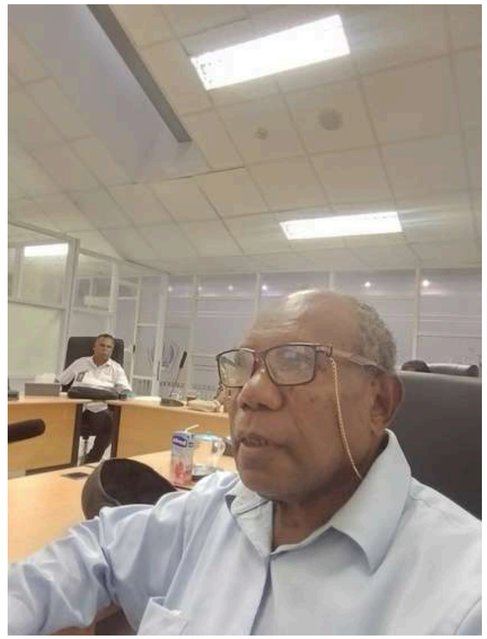
BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

REKOMENDASI

Disarankan agar Pemerintah Pusat bersama BP3OKP dan Komite Eksekutif dapat berkolaborasi dan bersinergi merumuskan Batas Kewenangan antara BP3OKP dan Komite Eksekutif, Hubungan Kerja Kedua Lembaga, serta Tata Kerja atau Mekanisme Kerja.







KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

18-19 AGUSTUS 2026

PENGEMBANGAN WISATA AIR (WATER TOURISM DEVELOPMENT) DI AMBAN PANTAI

PERMASALAHAN

1. Pengembangan Wisata Air (Water Tourism Development) yang difokuskan di Amban Pantai melalui Amban Beach Fast belum tertata secara menyeluruh karena karena baru diperkenalkan tanggal 14 Agustus 2026 dan puncak acaranya pada tanggal 18 - 19 Agustus 2026.
2. Infrastruktur Pengembangan Pariwisata berupa Amenitas, Aksesibilitas, dan Aktraksi belum tersedia secara menyeluruh karena belum diinventarisir, diidentifikasi obyek mana yang akan dikembangkan menjadi minat dan daya tarik wistawan dan visitor.
3. Stand UMKM ibu-ibu Orang Asli Papua untuk berjualan masih bersifat sementara dan belum ditata secara baik untuk mendaoatvsimpatik pengunjung untuk berbelanja

KEGIATAN STRATEGIS

1. Perlombaan Dayung Tradisional Peria dan Wanita sebagai satu obyek wisata air serta banyak rencana program yang belum dilakukan termasuk program konservasi Kawasan pesisir dan perairan Amban Pantai.
2. Keterlibatan BP3OKP dalan pemberian arahan pengembangan wisata air, Kegiatan pemeliharaan dan perlindungan anak penyu serta pengembangan wisata air berbasis budaya dan kearifan lokal

REKOMENDASI

Dipandang perlu memberikan wawasan tata kelola pengembangan wisata air berbasis masyarakat adat dan budaya bahari







KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

19–21 AGUSTUS 2026

ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN PERBAIKAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN MUSREMBANG OTONOMI KHUSUS TAHUN 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

PERMASALAHAN

1. Acara Pembukaan Sesi Pleno Asistensi dan Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrembang Otonomi Khusus Tahun 2026 oleh Gubernur Papua Barat yang dihadiri Pejabat Eselon I dari Kemendagri, Pejabat Eselon I dari Kemenkeu, Pejabat Eselon I dari Kemen BPN/Bappenas, Pejabat Eselon I KPK, Sekda Provinsi Papua Barat, Para Bupati, Pejabat OPD Eselon II, Dinas/Badan Pengampu Dana Otsus, namun terkesan banyak Bupati dan Kepala Dinas yang tidak hadir dalam acara tersebut.
2. Berdasarkan hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Keuangan dan Kementerian BPPN/Bappenas serta Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kinerja Kabupaten Se- Provinsi Papua Barat tentang Penyelarasan RPJMD. RKPD dan Restra denan RIPPP dan RAPPP pada umumnya di Provinsi maupun Kabupaten Se- Provinsi Papua Barat, seluruhnya berada pada posisi MERAH yang harus diperbaiki dan disempurnakan sesuai mekanisme kerja dan Sistem Pengawasan yang telah ditetapkan Ketiga Kementerian tersebut.
3. Sistem Pengawasan Terpadu dari 3 Kementerian, yaitu Mendagri dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Menkeu dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), MenPPN/Bappenas dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang disebut SISTEM INTEROPERABILITAS belum pernah diberikan Bimbingan Teknik agar dapat dipahami OPD Pengampu Dana Otonomi Khusus dan Anggota Pokja yang memberi penguatan kapasitas kepada BP3OKP sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Dana Otonomi Khusus bersama Kementerian/Lembaga

KEGIATAN STRATEGIS

1. Kementerian Dalam Negeri RI. Kementerian Keuangan RI, Kementerian BPPN/Bappenas RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi secara gamblang dan teknis memberikan informasi materi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keuangan Negara, terutama Pengelolaan Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan Pertanggung jawabannya.melalui Sistem Integrasi SIPPD, SIKD, SIPPD yang disebut Sistem Operabilitas..
2. Melakukan Asistensi dan Pendampingan terhadap OPD Pengampu Dana Otsus dari kabupaten dan provinsi tentang keselarasan RPJMD, RKPD dan Renstra dengan RIPPP dan RAPPP agar lebih sinergi sesuai Sistem Interoperabilitas yang menunjang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efesien. efektif. transparan dan akuntabel.
3. Asistensi dan Pendampingan dilakukan secara bergilir yang dipimpin langsung oleh Pa Dr. Supra Yoga Pejabat dari Kementerian Bappenas Ibu Dirjen, beberapa Staf Teknis dan Operator Computer, Pejabat Eselon III DJPB, Anggota BP3OKP dan bersama keempat Pokja.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

REKOMENDASI

Disarankan Pemerintah Pusat melalui ketiga Kementerian (Mendagri. Menkeu, Menbappenas) dapat memprogramkan Bimbingan Teknis INTEROPERABILITAS bagi seluruh Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Pokja BP3OKP) agar semua anggota Pokja dapat memahami keselarasan antara RPJMD, RKPD, RENSTRA dengan RIPPP dan RAPPP.







KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

22 AGUSTUS 2026

KUNJUNGAN KE LOKASI KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH SOWI 4 PANTAI

PERMASALAHAN

1. Masyarakat Nelayan Merah Putih di Sowi 4 Pantai mayoritas didominasi Orang Asli Papua (OAP) yang berbudaya bahari. Mereka bermukim di pesisir pantai dan membutuhkan rumah yang layak huni dan tertata agar mencegah perbuatan antropogenik yang mengganggu ekologi, ekosistem pesisir dan laut yang merupakan ecoregion wilayah administratif lingkungan Kota Manokwari.
2. Hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk hidup tertib, teratur, tentram, aman. damai. bagia sehtera dalan rumah tangga yang bahagia lahir dan batin belum tersentuh bagi OAP yang bermukim di pesisir pantai Sowi 4 karena kemampuan ekonomi dan keterbatasan SDM tang sering memicu masalah-masalah sosial, hukum dan ketenteraman serta ketertiban umum.

KEGIATAN STRATEGIS

1. Rapat dan dialog pembangunan perumahan rakyat, infrastruktur jalan, penataan kampung, pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat, pelepasan tanah adat oleh pemilik hak ulayat (marga mansim moi borai) kepada warga setempat di Sowi 4 Pantai.
2. Penjelasan Kepala Suku Mansim Moi Borai yang merelahkan untuk memberikan lahan tanah adat mereka untuk pembangunan perumahan rakyat bagi OAP di Sowi 4 pantai dan sekitarnya direspon BP3OKP dan Gubernur Papua Barat untuk realisasinya dilaksanakan secara kolaboratif dan koordinatif antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

REKOMENDASI

1. Gubernur Papua Barat untuk memerintahkan beberapa tokoh masyarakat Sowi 4 Pantai ke Jakarta bertemu dengan Kementerian/Lembaga untuk mendiskusikan dan mendapat penjelasan pembangunan perumahan nelayan merah putih.
2. Melakukan studi AMDAL guna penataan lingkungan perumahan yang hendak dibangun kontraktor yang akan ditentukan untuk keseimbangan lingkungan sosial dan lingkungan hidup secara inklusif dan berkelanjutan.







KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

23 AGUSTUS 2026

PERTEMUAN BP3OKP, BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT DENGAN PIMPINAN OPD KAB. MANOKWARI

PERMASALAHAN

1. Kabupaten Manokwari sejak tahun anggaran 2022 sampai 2026 saat ini sudah 4 tahun belum menyusun RPJMD, RKPD namun penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama 4 tahun tetap jalan diluar ketentuan prosudural.
2. Kabupaten Manokwari karena kelalaian dalam menyusun RPJMD RKPD, dan RESTRA, maka tidak bisa diserasikan dengan RIPPP dan RAPPP

KEGIATAN STRATEGIS

1. BP3OKP, Bappeda Prov. Papua Barat memberikan asistensi dan pendampingan kepada OPD Kabupaten Manokwari namun kesiapan daerah melalui Bupati Manokwari Hermus Indow untuk menyelaraskan RPJMD. RKPD Renstra dengan RIPPP dan RAPPP baru dimulai dalam awal bulan September 2026.
2. Bappeda Provinsi Papua Barat dan BP3OKP tetap memberi peringatan kepada Kabupaten Manokwari untuk konsekwen terhadap peraturan perundang-undangan.

REKOMENDASI

Dipandang perlu melakukan Bimbingan Teknik untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah kabupaten Manokwari agar tidak terlambat dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

24 AGUSTUS 2026

PERTEMUAN DENGAN SEKDA BERSAMA PIMPINAN OPD DAN PEJABAT ESELON III PEMDA KABUPATEN MANOKWARI DI RUANG RAPAT BAPPEDA

PERMASALAHAN

1. Hasil monitoring dan evaluasi keserasian antara RPJMD, RKPD, dan Renstra dengan RIPPP/RAPPP Kabupaten Manokwari belum dilaksanakan sesuai mekanisme kerja berdasarkan sistem pengawasan INTEROPEBILITAS , yaitu integrasi antara sistem SIPD. SIKD. SIPPD.
2. Keterlambatan penyampaian pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah kabupaten Manokwari berdasarkan hasil evaluasi BP3OKP bahwa ada beberapa faktor penyebab kurangnya pemahaman OPD pengampu dalam tata kelola penerimaan dana otonomi khusus.
3. Mentalitas birokrasi yang terindikasi dari rendahnya budaya kerja/etos kerja, dan soft skill berpengaruh terhadap rendah atau belum optimalnya Awareness dan Good Wil kemauan baik pimpinan instansi atau OPD pengampu untuk memperbaiki prestasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan melalui tata kelola penerimaan dana otonomi khusus.
4. Merosotnya mentalitas birokrat yang terindikasi dari rendahnya budaya kerja, etos kerja dan soft skill berpengaruh terhadap rendahnya Awareness dan Good Will pengambil kebijakan instansionsl baik itu pimpinan instansi atau OPD pengampu untuk memperbaiki prestasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan melalui tata kelola penerimaan dana otonomi khusus.

KEGIATAN STRATEGIS

1. BP3OKP dan Bappeda berkolaborasi menyampaikan pengarahan, melakukan asistensi dan pendampingan terhadap OPD Pengampu Dana Otonomi Khusus Kabupaten Manokwari dan menyampaikan batas interval waktu penyampaian dokumen dari Bappeda Kabupaten Manokwari kepada Bappeda Provinsi dan BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk diteruskan kepada Kementerian BPN/Bappenas di Jakarta.
2. Pengarahan Ketua BP3OKP tentang sistem pengawasan keuangan dengan metode Interoperabilitas untuk mengetahui keselarasan RPJMD, RKPD RENSTRA dengan RIPPP dan RAPPP guna menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara.
3. Diskusi bersama, dan pembuatan keputusan secara lisan antara Bupati kabupaten Manokwari melalui Sekda, Bappeda Manokwari, Pimpinan OPD Pengampu dana Otonomi Khusus dan BP3OKP RI Perwakilan Papua Barat yang memimpin rapat bahwa selambat-lambatnya 31 Agustus 2026 kesiapan semua dokumen tersebut sudah tersambung dan diakhiri dengan penanda tangani berita acara oleh Bappeda, BP3OKP, dan Instansi terkait yang berkompeten.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

REKOMENDASI

1. Dipandang perlu Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Keuangan, dan Kementerian BPN/Bappenas melakukan Bintek Sistem Pengawasan Integratif dengan metode pendekatan INTEROPERABILITAS(SIPD, SIKD, SIPPD) agar para peserta Bintek dapat memahami mekanisme kerjanya dan menghindari terjadinya miss-management.
2. Disarankan perlu adanya pendidikan karakter dalam rangka pembentukan kepribadian, mentalitas birokrat agar taat azas-azas pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efesien. efektif. transparan dan akuntabel berdasarkan Open Management, Etos/Budaya Kerja, Soft Skill dan materi penunjang lainnya.
3. Disarankan agar seluruh Kelompok Kerja, (Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Cerdas, Pokja Papua Produktif, dan Pokja Papua Polhukam/Papua Damai) pada BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat dapat mengikuti Bintek Sistem Pengawasan Terintegrasi (INTEROPERABILITAS) agar bersama Bappeda dapat melakukan Asistensi dan Pendampingan terhadap Tata Kelola Keuangan inklusif, teristimewa dalam menyelaraskan RPJMD, RKPD, RENSTRA dengan Substansi RIPPP dan RAPPP.





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

26 AGUSTUS 2026

RAPAT EVALUASI OTSUS 2026 DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENSTRA RPJMD SERTA RAP OTSUS 2027 DI RANSIKI

PERMASALAHAN

1. Rapat Evaluasi Otonomi Khusus Tahun 2026 dan Pendampingan Penyusunan Renstra RPJMD, RAP Otonomi Khusus 2027 di Kabupaten Manokwari Selatan diperhadapkan pada masalah mendasar bahwa pemerintah daerah kabupaten Manokwari Selatan tidak menyimpang dokumen resmi terkait dengan RPJMD, RKPD, RAP Tahun lalu karena pergantian kepemimpinan kepala daerah, dan pergantian beberapa pejabat eselon II yang menyebabkan kehilangan data dokumen tersebut secara sengaja.
2. Kurangnya pengawasan DPRK Manokwari terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana otonomi khusus sebagai akibat rendahnya sumberdaya anggota DPRK dalam fungsi Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Khusus di kabupaten Manokwari Selatan.

KEGIATAN STRATEGIS

1. .Asistensi dan Pendampingan dipandu oleh Bappeda Provinsi dan BP3OKP selama 2 hari, mulai dari Kantor Bupati Manokwari Selatan dan Kantor Bappeda Provinsi Papua Barat.
2. Dalam kegiatan Asistensi dan Pendampingan juga dilakukan arahan dari Ketua BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Ibu Ireni Manibui, S.H., M.Kn tentang Mekanisme Kerja dan Sistem Pengawasan Terpadu yang disebut Interoperabilitas, dari Kementerian Dalam Negeri (SIPPD), dari Kementerian Keuangan (SIKD), dan dari Kementerian BPPN/ Bappenas (SIPPD) kepada seluruh peserta Rapat.

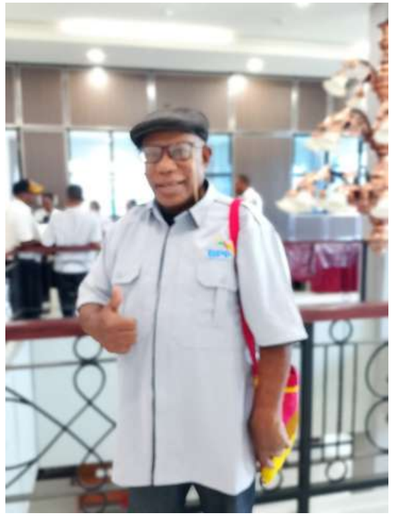
REKOMENDASI

Dipandang perlu melakukan Bimbingan Teknis tentang Tata Cara Penyusunan RPJMD, RKPD, RENSTRA, RAPBdan Sistem Pengawasan Terpadu yang disebut Interoperabilitas bagi seluruh OPD Teknis Pengampu Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Manokwari Selatan.









KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA



TERIMA KASIH

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP-RI)

PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT

LAPORAN BULANAN POKJA PAPUA PRODUKTIF

PERIODE AGUSTUS 2026



Manokwari, Papua Barat | 2026

PENDAHULUAN

Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Papua Produktif, BP3OKP-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, selama periode Agustus 2026, berdasarkan Inventarisasi Matriks Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Tahun 2026.

Kegiatan periode ini dikelompokkan menjadi dua kategori: Kegiatan Strategis Papua Produktif (fokus dan kepemimpinan utama Pokja) dan Kegiatan Bersama/Lintas Pokja (dilaksanakan bersama Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, dan/atau Papua POLHUKAM, termasuk kegiatan institusional tata kelola Dana Otsus).



4

Kegiatan Strategis
Papua Produktif



14

Kegiatan Bersama /
Lintas Pokja



18

Total Kegiatan
Bulan Agustus 2026

BAGIAN II

Kegiatan Strategis Papua Produktif

Kegiatan yang secara langsung berada di bawah kepemimpinan dan fokus utama Pokja Papua Produktif, meliputi pengembangan ekonomi lokal, dunia usaha, pariwisata, peternakan, dan perikanan produktif Orang Asli Papua.

4 KEGIATAN STRATEGIS



1. Sinkronisasi Awal Pembentukan Perseroda (BUMD) Kabupaten Pegunungan Arfak

KEGIATAN STRATEGIS PAPUA PRODUKTIF

6 Agustus 2026 | Aula Yosmar, Kab. Pegunungan Arfak | Papua Produktif & Papua Cerdas



Aula Yosmar, Kab. Pegunungan Arfak — 6 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Dilaksanakan sinkronisasi awal antara Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, tim ahli Universitas Papua (UNIPA), dan BP3OKP Provinsi Papua Barat terkait rencana pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Tim ahli UNIPA memaparkan sepuluh sektor strategis yang berpotensi menjadi sumber pendapatan Perseroda Pegaf, yaitu peternakan, industri pengolahan (garmen, tepung ikan, baki telur, es), perdagangan dan logistik bahan bangunan, jasa pendukung pertambangan, pariwisata, perumahan bersubsidi, transportasi terintegrasi, perkebunan pala/kakao/kopi, dan pembentukan Dana Abadi daerah. Dibahas pula kerangka hukum pembentukan Perseroda dengan kepemilikan saham 100% Pemerintah Daerah pada tiga tahun pertama, serta tiga Peraturan Daerah utama yang diperlukan.

CAPAIAN KEGIATAN

Teridentifikasinya sepuluh sektor usaha strategis potensial bagi Perseroda Pegaf beserta kerangka hukum awal pembentukannya; disepakati strategi pengajuan bertahap berupa konsultasi virtual dengan Direktur BUMD Kementerian Dalam Negeri sebelum kunjungan langsung ke Jakarta, dengan estimasi tanggapan resmi paling lambat 15 hari kerja.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

BPKD Kabupaten Pegaf menyiapkan dana operasional tahap kedua agar survei potensi strategis dapat dilanjutkan ke distrik-distrik sekitar; Bupati menyusun surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri dilampiri kajian kelayakan dari tim UNIPA/BIMAH; dijajaki pula kerja sama pendidikan tinggi jarak jauh (Caritas University dan Universitas Doman) untuk peningkatan kualifikasi aparatur sipil negara setempat.

2. Audiensi bersama ASPEWA — Dukungan Papua Barat Produktif untuk Amban Beach Fest 2026

KEGIATAN STRATEGIS PAPUA PRODUKTIF

14 Agustus 2026 | Yenbeba, Amban Pantai, Manokwari | Papua Produktif



Yenbeba, Amban Pantai, Manokwari — 14 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Pokja Papua Produktif melakukan audiensi bersama Asosiasi Pecinta Wisata Air (ASPEWA), yang berafiliasi dengan Yayasan Anak Air Pulau Papua, membahas permohonan dukungan penyelenggaraan Amban Beach Fest 2026 pada 24–29 Agustus 2026. Festival ini merupakan ajang wisata budaya, olahraga wisata bahari (dayung tradisional, stand up paddle, surfing, diving, snorkeling), serta pemberdayaan UMKM kuliner dan kerajinan masyarakat pesisir. Turut dibahas pengembangan Pasar Pantai Sebala yang telah diikuti lebih dari 60 UMKM lokal, serta peta jalan ASPEWA periode 2026–2030 mencakup tujuh kabupaten di Papua Barat.

CAPAIAN KEGIATAN

Terjalin komitmen dukungan Program Papua Barat Produktif untuk ekosistem pariwisata pesisir; disepakati peta jalan bertahap Manokwari–Provinsi–Nasional menuju target Internasional 2030.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

ASPEWA menyusun laporan & proposal 2027; BP3OKP mengadvokasi pendanaan Otsus kategori 'pariwisata rintisan'.

3. SHEK Asesmen Pabrik Pakan Ternak — SP V, Distrik Masni

KEGIATAN STRATEGIS PAPUA PRODUKTIF

13 Agustus 2026 | Balai Pembibitan, SP V Distrik Masni, Kab. Manokwari | Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM



Balai Pembibitan, SP V Distrik Masni, Kab. Manokwari — 13 Agustus 2026





HASIL KEGIATAN

Tim Pokja meninjau langsung kesiapan fisik dan teknis pabrik pakan ternak berkapasitas 1–3 ton/hari yang telah dibangun bertahap melalui APBD selama tiga tahun terakhir, berikut program Sekolah Peternakan Rakyat hasil kerja sama dengan IPB dan UNIPA. Teridentifikasi kendala daya listrik (kapasitas terpasang 25.000 VA berbanding kebutuhan operasional penuh 120.000 VA), belum tersedianya gudang bahan baku dan produk jadi, serta kebutuhan pasokan jagung berkelanjutan sebagai bahan baku utama (±60% dari total produksi).

CAPAIAN KEGIATAN

Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur pendukung pabrik pakan serta peluang kemitraan rantai pasok jagung dengan petani lokal di wilayah SP, Prafi, hingga Teluk Wondama, sekaligus keterkaitannya dengan rencana pembentukan BUMD/Perseroda.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Koordinasi lintas sektor dengan PLN untuk penambahan trafo daya listrik, usulan pembangunan gudang bahan baku/produk dan pengadaan forklift dalam APBD Perubahan, penguncian kebutuhan pengembangan pakan-peternakan ke dalam Musrenbang dan dokumen Rencana Aksi, serta sinergi Dinas Peternakan dengan Dinas Pertanian untuk pembinaan petani jagung.

4. SHEK Asesmen Kolam Ternak Ikan Air Tawar — Balai Benih Ikan Sentral

KEGIATAN STRATEGIS PAPUA PRODUKTIF

13 Agustus 2026 | Balai Benih Ikan Sentral, Provinsi Papua Barat | Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM



Balai Benih Ikan Sentral, Provinsi Papua Barat — 13 Agustus 2026





HASIL KEGIATAN

Tim Pokja mengidentifikasi kondisi faktual Balai Benih Ikan (BBI): kekosongan posisi Kepala UPT, kekurangan personil lapangan untuk kawasan seluas ±20 hektare, kerusakan konstruksi sebagian kolam, ancaman hama burung migrasi musiman, serta pencemaran Sungai Wariori (sumber irigasi utama) akibat aktivitas tambang emas ilegal di hulu yang memperlambat masa tumbuh ikan hingga satu tahun. Harga pakan pabrikan yang tinggi (Rp470.000/sak 30 kg) turut menekan margin petani ikan lokal.

CAPAIAN KEGIATAN

Teridentifikasinya kondisi faktual sarana-prasarana, SDM, dan tantangan lingkungan yang menghambat penguatan program Papua Produktif di sektor perikanan darat.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Percepatan pengisian Kepala UPT definitif, rehabilitasi konstruksi kolam dan sistem irigasi, penertiban aktivitas tambang ilegal di hulu Sungai Wariori oleh instansi dan aparat terkait, serta integrasi program pakan lokal (termasuk rencana pabrik pakan SP V) untuk menekan biaya operasional pembudidaya ikan.

BAGIAN III

Kegiatan Bersama / Lintas Pokja

Kegiatan yang dilaksanakan bersama Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, dan/atau Pokja Papua POLHUKAM, serta kegiatan institusional BP3OKP terkait tata kelola Dana Otonomi Khusus yang berdampak pada program Papua Produktif.

14 KEGIATAN BERSAMA



1. Rapat Koordinasi Pemantauan Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Otsus Papua

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

3 Agustus 2026 **Gedung Merah Putih KPK, Jakarta** **Anggota BP3OKP + KPK, K/L, Pemda Tanah Papua**



Gedung Merah Putih KPK, Jakarta — 3 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

BP3OKP bersama KPK, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, BPKP, dan LKPP membahas percepatan Perdasus OAP, tagging anggaran, dan pembentukan gugus tugas pengawal komitmen.

CAPAIAN KEGIATAN

Sinergi lintas lembaga menguat untuk tata kelola Dana Otsus yang transparan dan tepat sasaran, termasuk bagi program produktif.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Percepatan Perdasus OAP, tagging anggaran menyeluruh, dan pembentukan gugus tugas pengawal implementasi.

2. Audiensi Ditjen Perimbangan Keuangan — Transfer ke Daerah Manokwari Selatan

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

4 Agustus 2026 **Kementerian Keuangan RI, Jakarta** **Anggota BP3OKP**



Kementerian Keuangan RI, Jakarta — 4 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Mendampingi Bupati Manokwari Selatan membahas mekanisme Transfer ke Daerah dan tambahan alokasi Dana Otsus/DBH di tengah realisasi kinerja yang masih rendah.

CAPAIAN KEGIATAN

Teridentifikasi kendala utama pada kelengkapan administrasi dan dokumen RAP, bukan pada ketersediaan anggaran.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Percepatan penyusunan RAP dan syarat salur, penerapan tagging anggaran serta rekening khusus Otsus.

3. Audiensi Kementerian ESDM — Program Papua Terang

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

5 Agustus 2026 **Kementerian ESDM, Jakarta** **Anggota BP3OKP**



Kementerian ESDM, Jakarta — 5 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Membahas percepatan elektrifikasi berbasis Solar Home System serta potensi energi air dan angin di kabupaten-kabupaten Papua Barat.

CAPAIAN KEGIATAN

Disepakati BP3OKP menghimpun usulan bupati untuk diteruskan ke Kementerian ESDM sebagai bahan program elektrifikasi wilayah terpencil.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Penyusunan surat resmi ke kabupaten/provinsi guna mempercepat pemerataan akses listrik bagi ekonomi produktif.

4. Rakor Teknis Perencanaan dan Pengelolaan RAPPP — Kementerian PPN/Bappenas

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

5 Agustus 2026 **Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta** **Anggota BP3OKP**



Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta — 5 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Membahas peran BP3OKP dalam RAPPP, pembentukan Tim Implementasi, penajaman 18 klaster PKPN, dan rendahnya kesesuaian Musrenbang Otsus dengan RAPPP.

CAPAIAN KEGIATAN

Disepakati pembentukan Tim Pengawal dan Tim Asistensi RAPPP di tiap kabupaten pada enam provinsi Tanah Papua.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Percepatan Tim Pendamping daerah, sinkronisasi RKPD–RAPPP hingga 100%, dan penyusunan SOP pengawasan.

5. Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II TA 2026

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

5 Agustus 2026 **Zoom (Daring)** **Anggota BP3OKP**



Zoom (Daring) — 5 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Wamendagri mengingatkan pemda se-Tanah Papua agar menuntaskan penyaluran Dana Otsus Tahap II secara tepat waktu dan akuntabel.

CAPAIAN KEGIATAN

Ditegaskan komitmen transparansi bersama KPK serta penguatan fungsi reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Pemda segera melengkapi syarat penyaluran Tahap II dengan pengawasan berkelanjutan.

6. Rapat Tim Pengarah Sinergi Implementasi RAPPP 2025–2029

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

10 Agustus 2026 **Menara Bappenas, Jakarta** **Anggota BP3OKP**



Menara Bappenas, Jakarta — 10 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Dihadiri Kementerian PPN/Bappenas, Komite Eksekutif, dan Badan Pengarah Papua se-enam provinsi untuk menyelaraskan arah kebijakan RAPPP.

CAPAIAN KEGIATAN

Sinergi lintas kementerian/lembaga menguat dalam mengawal implementasi RAPPP yang berkeadilan dan berkelanjutan.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Menghimpun dan menindaklanjuti masukan strategis lintas kementerian/lembaga.

7. SHEK Sektor Kesehatan — RSUD Provinsi Papua Barat

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

12 Agustus 2026 **RSUD Provinsi Papua Barat, Manokwari** **Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM**



RSUD Provinsi Papua Barat, Manokwari — 12 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Asesmen tata kelola RSUD menemukan kekurangan 26 dokter spesialis, ketiadaan spesialis radiologi, dan serapan Dana Otsus Sehat baru ±Rp2 M dari Rp50 M akibat regulasi kaku.

CAPAIAN KEGIATAN

Teridentifikasi akar masalah tata kelola BLUD dan urgensi revisi regulasi teknis sektor kesehatan.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Revisi Pergub/Juknis, kenaikan insentif dokter spesialis, dan optimalisasi fasilitas MCU lokal.

8. Lokakarya Percepatan Dana Otsus & DTI Tahap II serta RAP Awal 2027

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

18–21 Agustus 2026 **GKN, Arfai, Manokwari**

Anggota BP3OKP, Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua POLHUKAM



GKN, Arfai, Manokwari — 18–21 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Membahas percepatan penyaluran Dana Otsus/DTI enam provinsi Papua serta RAP Awal 2027 via interoperabilitas SIPPP–SIKD–SIPD; realisasi Tahap II baru 42,58%.

CAPAIAN KEGIATAN

Kesepahaman soal syarat salur, penggunaan SILPA, dan percepatan penyaluran via KPPN (SLA 1–2 hari kerja).

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Akselerasi RAP Perubahan di SIKD dan penyampaian Laporan Tahunan Otsus ke BP3OKP/DPRP/MRP.

9. Sesi Pleno Pendampingan Evaluasi Musrenbang Otsus 2026

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

19 Agustus 2026 **Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat** **Anggota BP3OKP, Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM**



Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat — 19 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Keselarasan usulan daerah dengan RAPPP baru mencapai 57,49% secara nasional; 11 daerah belum mengunci Berita Acara di SIPPP.

CAPAIAN KEGIATAN

Disepakati pendekatan penyelarasan solutif tanpa membongkar struktur RKPD yang telah final.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Desk pendampingan teknis selama tiga hari dan penguncian Berita Acara di SIPPP.

10. Tim Asistensi — Pendampingan Evaluasi Musrenbang Otsus 2026

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

20–21 Agustus 2026 **Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat**

Anggota BP3OKP, Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM



Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat — 20–21 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Penajaman 469 sub-kegiatan Musrenbang; 262 sub-kegiatan (55,86%) berhasil diselaraskan dengan RAPPP.

CAPAIAN KEGIATAN

Fakfak, Teluk Bintuni, dan Kaimana mencapai keselarasan 100%; diusulkan inovasi Puskesmas terapung dan elektrifikasi off-grid.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Sub-kegiatan belum selaras dimasukkan ke lampiran usulan revisi RAPPP; pendampingan intensif bagi kabupaten tertinggal.

11. Rakor Kabupaten Manokwari — Keselarasan RPJMD dengan RAPPP 2025–2029

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

24 Agustus 2026 **Kantor Bappeda Kabupaten Manokwari** **Anggota BP3OKP, Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM**



Kantor Bappeda Kabupaten Manokwari — 24 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Keselarasan usulan Kab. Manokwari terhadap RAPPP baru 36,04%, berisiko nol alokasi Dana Otsus karena RPJMD/RKPD belum terkunci di SIPD.

CAPAIAN KEGIATAN

Disepakati percepatan penguncian data statistik sektoral (DSSD 2020–2023) dan 48 dokumen Renstra OPD.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Penerbitan SK Bupati untuk DSSD, penyeragaman jumlah OPD, dan target penguncian dokumen sebelum akhir Agustus 2026.

12. Rakor Evaluasi Otsus & Pendampingan Renstra, RPJMD, RAP — Manokwari Selatan

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

26 Agustus 2026 | **Setda Kabupaten Manokwari Selatan (Ransiki)** | **Anggota BP3OKP, Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM**



Setda Kabupaten Manokwari Selatan (Ransiki) — 26 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Mendampingi penyusunan dokumen perencanaan Manokwari Selatan yang bersama Pegunungan Arfak memerlukan akselerasi intensif sebelum tenggat SIKD 31 Agustus 2026.

CAPAIAN KEGIATAN

Pimpinan OPD menyatakan kesiapan dan komitmen kolektif bekerja intensif bersama tim pendamping provinsi.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Akselerasi draf Renstra/RPJMD berbasis klaster bidang dan finalisasi penguncian SIKD.

13. Desk Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan — Manokwari Selatan

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

26 Agustus 2026 | **Setda Kabupaten Manokwari Selatan (Ransiki)** | **Anggota BP3OKP, Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM**



Setda Kabupaten Manokwari Selatan (Ransiki) — 26 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Desk pendampingan menyamakan persepsi dan menyinkronkan program daerah dengan anggaran Otsus, menegaskan tidak boleh ada program tanpa anggaran.

CAPAIAN KEGIATAN

Disepakati program di luar alokasi Otsus utama dapat disiasati melalui sumber pendanaan alternatif yang sah.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

OPD menuntaskan dokumen pada hari yang sama; target penetapan RPJMD/RKPD akhir pekan berjalan.

14. Pendampingan Lanjutan Penyusunan Renstra, RPJMD, serta RAP Otsus 2027

KEGIATAN BERSAMA / LINTAS POKJA

27–28 Agustus 2026 **Ruang Rapat Bappeda Provinsi Papua Barat** **Anggota BP3OKP, Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua POLHUKAM**



Ruang Rapat Bappeda Provinsi Papua Barat — 27–28 Agustus 2026

HASIL KEGIATAN

Kelanjutan pendampingan Manokwari Selatan, berfokus menyinkronkan program daerah dengan anggaran Otsus agar perencanaan terintegrasi dengan sistem.

CAPAIAN KEGIATAN

Ditegaskan kembali prinsip sinkronisasi program-anggaran dan kepatuhan pada sistem interoperabilitas.

REKOMENDASI & TINDAK LANJUT

Penyesuaian data sesuai sistem dan target penetapan RPJMD/RKPD agar input RAP3 dapat dilanjutkan.

IV. RANGKUMAN

Rekomendasi & Tindak Lanjut Prioritas

1

Mengawal percepatan pembentukan Perseroda (BUMD) Kab. Pegunungan Arfak, termasuk kajian kelayakan bersama UNIPA/BIMAH dan surat resmi Bupati ke Kemendagri.

2

Mendorong dukungan kelembagaan dan pendanaan Otsus 'pariwisata rintisan' bagi ekonomi kreatif pesisir seperti Amban Beach Fest dan Pasar Pantai Sebala.

3

Mengawal penyelesaian infrastruktur sektor produktif hasil asesmen SHEK — daya listrik & gudang pabrik pakan SP V, rehabilitasi kolam dan penertiban pencemaran Sungai Wariori.

4

Mendorong percepatan penguncian RPJMD, Renstra, dan RKPD di Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak agar tidak kehilangan alokasi Dana Otsus 2026–2027.

5

Mengawal implementasi Program Papua Terang (elektrifikasi energi terbarukan) sebagai penopang aktivitas ekonomi produktif di wilayah terpencil.

6

Melanjutkan koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu, dan KPK untuk penguatan tata kelola Dana Otsus yang transparan dan berdampak bagi Orang Asli Papua.

Terima Kasih

Demikian Laporan Bulanan Pokja Papua Produktif BP3OKP-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat periode Agustus 2026 disusun sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut, serta bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP)
Perwakilan Provinsi Papua Barat — Pokja Papua Produktif

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

Badan Pengarah Papua

POKJA PAPUA SEHAT

BP3OKP

MOUNTHLY REPORT

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
Perwakilan Papua Barat

AGUSTUS 2026

Mobile Health Service-RS TERAPUNG BINTUNI





Operasi Perdana di Pesisir Terpencil

15–16 Juli 2026: Kapal RS Terapung Bintuni Sehat resmi beroperasi menjangkau Distrik Tomu, Teluk Bintuni.

Pelayanan komprehensif mencakup pemeriksaan umum, imunisasi, skrining TBC-HIV, konsultasi gizi, hingga **keberhasilan 2 tindakan operasi anestesi umum** di ruang operasi kapal.

Wujud nyata peran BP3OKP **POKJA Papua Sehat** dari perencanaan, penganggaran hingga eksekusi langsung di lapangan.

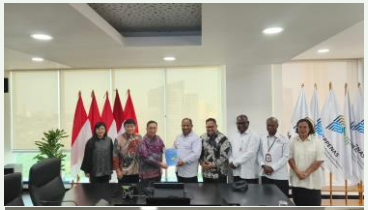


1 ASPEK PERENCANAAN

Penyelarasan implementasi RAPPP 2025–2029 dan penguatan sinergi perencanaan percepatan pembangunan Papua Barat.

P.1 Rakor Teknis Bappenas — Sinergi BPP dalam Implementasi RAPPP Papua

5 Agustus 2026 *Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta*





Anggota BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pengelolaan RAPPP Papua di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada 5 Agustus 2026. Rapat membahas sinergi peran BPP dalam implementasi RAPPP, rencana pembentukan Tim Implementasi RAPPP dan Pokja, serta penguatan koordinasi BPP–Bappenas.

Bappenas akan membentuk Tim Pengawal RAPPP dan Tim Asistensi di tiap kabupaten 6 Provinsi Papua. Tingkat kesesuaian Musrenbang Otsus dengan RAPPP masih rendah — perlu didorong hingga 100%. Diperlukan penajaman 18 klaster PKPN dan percepatan revisi Permendagri tentang Musrenbang Otsus 2023.

BP3OKP: Kehadiran BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam forum ini menjadi bentuk komitmen aktif dalam mengawal implementasi RAPPP, sekaligus memperkuat sinergi antara Badan Pengarah Papua dan Kementerian PPN/Bappenas demi pembangunan Papua yang lebih terarah dan berkeadilan.

✔ **Capaian:** Tim Pengawal RAPPP dan Tim Asistensi per kabupaten disepakati; 18 klaster PKPN dipertajam; revisi Permendagri Musrenbang Otsus 2023 dipercepat.

P.2 Rapat Tim Pengarah Sinergi Implementasi RAPPP 2025–2029 — Menara Bappenas

10 Agustus 2026 *Ruang Rapat Executive, Lt. 20 Menara Bappenas, Jakarta*







Anggota BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menghadiri Rapat Tim Pengarah Sinergi Implementasi RAPPP 2025–2029 yang diselenggarakan di Lantai 20 Menara Bappenas, Jakarta, pada 10 Agustus 2026. Rapat dipimpin Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Bpk. Medrilzam, dan dihadiri Ketua Komite Eksekutif BP3OKP Velix Vernando Wanggai, Sekretaris BPP, serta seluruh Anggota BPP perwakilan 6 Provinsi Papua.

Rapat bertujuan memperkuat komitmen bersama, menyelaraskan arah kebijakan, dan menghimpun masukan strategis lintas kementerian dan lembaga guna mendukung implementasi RAPPP secara efektif dan tepat sasaran.

BP3OKP: Kehadiran BP3OKP Papua Barat dalam forum Level 20 Menara Bappenas menegaskan posisi lembaga dalam rantai koordinasi implementasi RAPPP. BP3OKP menyampaikan masukan: tipologi wilayah pesisir Papua Barat berbeda dengan pegunungan — costing program harus berbeda, tidak bisa satu ukuran untuk semua.

✔ **Capaian:** Komitmen bersama implementasi RAPPP diperkuat; masukan costing berbasis tipologi wilayah Papua Barat disampaikan ke Bappenas; sinergi seluruh Anggota BPP se-6 Provinsi terperkuat.

1 ASPEK PERENCANAAN

Pendampingan evaluasi Musrenbang Otsus 2026 dan perbaikan keselarasan perencanaan daerah Papua Barat.

P.3 **Rapat Pleno Pembukaan Pendampingan Perbaikan Musrenbang Otsus 2026**

19 Agustus 2026 *Gedung Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, Manokwari*

BP3OKP RI bersama Kementerian PPN/Bappenas, Pemprov Papua Barat, dan seluruh perangkat daerah membuka secara resmi kegiatan Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026, di Kantor Gubernur Papua Barat, pada 19 Agustus 2026.

Hasil evaluasi Musrenbang Otsus 2026 mengungkap fakta mengkhawatirkan: rata-rata tingkat keselarasan usulan daerah Papua Barat dengan RAPPP baru mencapai 57,49%. Sebanyak 11 daerah (10 kab. + 1 provinsi) belum mengunci Berita Acara di SIPPP, dan 6 daerah belum menyelesaikan rancangan RKPD — termasuk Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. BP3OKP menekankan pentingnya sinergitas, kolaborasi, dan komitmen bersama antarkementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mengawal Otsus Jilid II. BP3OKP menegaskan bahwa tata kelola pembangunan dan keuangan daerah harus terus diperbaiki dengan berpedoman pada prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel guna mendorong percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua dan berdampaknya nyata khususnya untuk Orang Asli Papua.

BP3OKP: BP3OKP menegaskan: 'Keselarasan 57,49% bukan angka yang boleh dirayakan — masih 42,51% program yang tidak selaras. Ini adalah pemborosan Dana Otsus yang tidak dapat diterima.' BP3OKP mendorong: setiap program Otsus HARUS dapat menjelaskan kaitannya dengan RAPPP, jika tidak bisa — program itu tidak layak didanai Otsus.

Capaian: Pendampingan perbaikan Musrenbang Otsus 2026 resmi dimulai; 11 daerah yang belum kunci BA di SIPPP teridentifikasi; mekanisme perbaikan berbasis sistem SIPPP-SIPD-SIKD disepakati.





1 ASPEK PERENCANAAN

Pendampingan evaluasi Musrenbang Otsus 2026 dan perbaikan keselarasan perencanaan daerah Papua Barat.



P.4 **Forum Asistensi Perbaikan Hasil Evaluasi Musrenbang Otsus 2026 — Provinsi Papua Barat**

20–21 Agustus 2026 *Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, Manokwari*

Forum Pendampingan dan Asistensi Perbaikan Hasil Evaluasi Musrenbang Otsus 2026 untuk Provinsi Papua Barat diselenggarakan pada 20–21 Agustus 2026, dihadiri perwakilan Bappenas, Pemprov Papua Barat, dan seluruh perangkat daerah terkait. Forum ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Pleno 19 Agustus dan amanat KPK dalam perbaikan tata kelola perencanaan Dana Otsus.

Forum melakukan penajaman dan perbaikan terhadap hasil evaluasi Musrenbang Otsus 2026: setiap usulan harus memiliki keterkaitan jelas dengan prioritas percepatan pembangunan RAPPP 2025–2029. Integrasi tiga sistem utama — SIPPP (Bappenas), SIPD (Kemendagri), dan SIKD (Kemenkeu) — menjadi tulang punggung perbaikan.

BP3OKP: Anggota BP3OKP Bersama POKJA Khususnya Pokja Papua Sehat mendampingi OPD daerah satu per satu dalam memperbaiki usulan program agar selaras RAPPP. BP3OKP menegaskan: 'Komitmen pencegahan korupsi bukan slogan — setiap rupiah Dana Otsus harus tertelusur dalam sistem dan dapat dipertanggungjawabkan'

Capaian: Penajaman dan perbaikan hasil evaluasi Musrenbang Otsus 2026 Papua Barat terlaksana; seluruh usulan OPD harus perbaiki keselarasan RAPPP sebelum dikunci di SIPPP; mitigasi risiko korupsi Dana Otsus ditegaskan.

1 ASPEK PERENCANAAN

Pendampingan intensif penyusunan RPJMD, Renstra, dan RAP Otsus kabupaten Papua Barat yang masih tertinggal.

P.5 **Rakor Manokwari — Keselarasan RPJMD dengan RAPPP 2025–2029**

24 Agustus 2026 *Kantor Bappeda Manokwari*





BP3OKP bersama Bappeda Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi dengan Kabupaten Manokwari terkait keselarasan RPJMD dengan RAPPP 2025–2029, pada 24 Agustus 2026. Irene Manibuy menegaskan kondisi kritis: berdasarkan evaluasi Bappenas per 3 Agustus 2026, tingkat keselarasan usulan Otsus Papua Barat terhadap RAPPP baru mencapai 36,04%.

Yang lebih mengkhawatirkan: RPJMD Kabupaten Manokwari masih pada tahap rancangan awal di SIPD — sehingga data RKPD belum terkunci dan keselarasan RAPPP tidak terintegrasikan. Kondisi ini berisiko menyebabkan Kabupaten Manokwari bernilai NOL dan tidak memperoleh alokasi Dana Otsus dari Kemenkeu.

BP3OKP: Ibu Irene (BP3OKP) Menekankan pentingnya pemahaman seluruh OPD terhadap sistem yang terkoneksi, yaitu SIKD (Kemenkeu), SIPD (Kemendagri), dan SIP3 (Bappenas), agar program Otsus (Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif) dapat terintegrasi. Dan juga pentingnya sinergi antar-instansi untuk merapikan data statistik sektoral (DSSD), mengunci 48 dokumen Renstra OPD, merekonsiliasi SILPA dana Otsus, serta menyelesaikan penataan posisi jabatan agar alokasi anggaran dapat berjalan sesuai prinsip money follows program demi kemajuan dan dirasakan langsung oleh masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

Capaian: Kondisi kritis RPJMD Manokwari terungkap (baru rancangan awal di SIPD); komitmen percepatan penyelesaian 48 Renstra OPD dan rekonsiliasi SILPA Dana Otsus ditetapkan.

1 ASPEK PERENCANAAN

Pendampingan intensif penyusunan RPJMD, Renstra, dan RAP Otsus kabupaten Papua Barat yang masih tertinggal.









P.6 **Pendampingan Renstra/RPJMD/RAP Otsus 2027 — Manokwari Selatan, & Bappeda Provinsi**

26–28 Agustus 2026 *Setda Mansel (26 Agt) & Bappeda Provinsi Papua Barat (27–28 Agt)*

BP3OKP RI bersama Pokja Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif melaksanakan pendampingan intensif selama 3 hari: 26 Agustus di Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan (Ransiki), dan 27–28 Agustus di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Papua Barat, Manokwari.
Arahan dari BP3OKP Sinkronisasi Program dan Anggaran, bahwa ke depan tidak boleh ada lagi program yang dibuat tanpa ketersediaan anggaran yang jelas, atau sebaliknya, ada anggaran tanpa program yang terakomodir. Semua harus berjalan seiring dan saling mengunci (program ada, uang ada). diingatkan agar tidak mudah putus asa atau keluar dari sistem ketika menghadapi kendala administrasi. Belajar dari pengalaman sebelumnya (seperti capaian provinsi lain yang sempat di angka 58% namun bisa diselesaikan melalui penyesuaian dan pencarian proksi/solusi terdekat), kepatuhan pada mekanisme sistem adalah kunci utama. Kelengkapan Dokumen Pendukung: Setiap usulan program wajib didukung oleh kelengkapan dokumen yang valid agar dapat lolos verifikasi dan dimasukkan ke dalam berita acara maupun menu program yang disesuaikan.

BP3OKP: BP3OKP memimpin sesi desk selama 3 hari — mendampingi OPD satu per satu dalam menyinkronkan program dan anggaran Otsus. Framing 'pasien rawat jalan' adalah pesan tegas BP3OKP: kabupaten yang lambat merencanakan akan ketinggalan dan kehilangan Dana Otsus yang sudah dialokasikan.

Capaian: Pendampingan intensif 3 hari untuk Mansel dan Bappeda Provinsi terlaksana; sinkronisasi program-anggaran Otsus 2027 dipercepat; seluruh OPD berkomitmen selesaikan dokumen sebelum tenggat.

2 ASPEK PENGANGGARAN

Pemantauan komitmen tatakelola Dana Otsus bersama KPK dan klarifikasi mekanisme Transfer ke Daerah.

A.1 Rakor KPK — Pemantauan Implementasi Komitmen Bersama Tatakelola Otsus Papua

3 Agustus 2026 *Ruang Rapat Sulawesi Lt. 7, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta*





BP3OKP Papua Barat bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah se-Tanah Papua mengikuti rapat koordinasi pemantauan implementasi Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 3 Agustus 2026. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat regulasi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Dana Otsus, serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan OAP.

Agenda utama: percepatan penyusunan Perdasus OAP, penerapan tagging anggaran, penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan Papua, penguatan sistem pengadaan barang dan jasa, serta pembentukan gugus tugas (task force) pengawalan implementasi komitmen bersama.

BP3OKP: BP3OKP memastikan bahwa Deklarasi 18 Rencana Aksi Dana Otsus yang ditandatangani pada Juli 2026 bukan hanya dokumen — KPK kini menjadi mitra pengawas. BP3OKP mendorong pembentukan task force yang melibatkan BP3OKP sebagai lembaga koordinatif, bukan hanya KPK dan pemda.

Capaian: Progres implementasi Komitmen Bersama 18 Rencana Aksi Dana Otsus dipantau KPK; percepatan Perdasus OAP dan tagging anggaran disepakati; rencana pembentukan gugus tugas pengawasan ditetapkan.

A.2 Audiensi Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu — TKD, Dana Otsus & Evaluasi Kinerja Pemerintah daaerah Manokwari Selatan

4 Agustus 2026 *Kantor Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Jakarta*



Anggota BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat melakukan audiensi di Kantor Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Bersama Bupati Kab. Manokwari Selatan, pada 4 Agustus 2026, untuk mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan dan mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Otsus.

Temuan kritis terungkap: capaian realisasi kinerja Pemda Manokwari Selatan masih sangat rendah — beberapa indikator berada pada angka 0% atau belum ada progres signifikan. Pemda memiliki alokasi anggaran memadai, tetapi masalah terletak pada kelengkapan administrasi dan lambatnya RAP, dan Pemda mengajukan permintaan tambahan dana padahal alokasi yang ada belum dicairkan.

BP3OKP: BP3OKP menegaskan kepada Kemenkeu: 'Manokwari Selatan tidak kekurangan uang — yang kurang adalah kapasitas perencanaan dan komitmen OPD untuk menyelesaikan dokumen.' BP3OKP berkomitmen mengawal dan mempercepat penyelesaian RAP kepada pemerintah daerah di papua barat agar tidak kehilangan alokasi Dana Otsus.

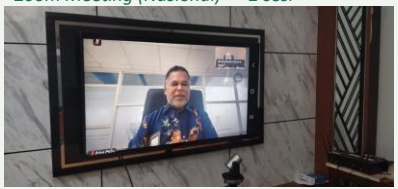
2 ASPEK PENGANGGARAN

Percepatan penyaluran Dana Otsus Tahap II 2026 dan penguatan interoperabilitas sistem perencanaan-penganggaran.

A.3 Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otsus & DTI Tahap II 2026 — Dipimpin Wamendagri

5 & 27 Agustus 2026 *Zoom Meeting (Nasional) — 2 sesi*





BP3OKP Papua Barat mengikuti dua sesi Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II Tahun 2026 yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, via Zoom, pada 5 dan 27 Agustus 2026. Wamendagri mengingatkan seluruh Pemda Papua untuk segera menuntaskan penyaluran Dana Otsus Tahap II secara tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel.

27 Agustus: Wamendagri menegaskan meskipun tahapan perencanaan sudah berjalan, banyak dokumen perencanaan belum selaras dengan kamus keselarasan. Ditemukan Dana Otsus digunakan untuk kegiatan pendataan kependudukan yang seharusnya dari DAU — pemborosan yang tidak dapat ditoleransi.

BP3OKP: BP3OKP mendampingi Pemda Papua Barat dalam dua sesi Zoom ini dan memastikan arahan Wamendagri ditindaklanjuti: setiap rupiah Dana Otsus harus didukung regulasi kuat (Perkada) dan dapat dipertanggungjawabkan. BP3OKP menekankan: 'Dana Otsus bukan dana serbaguna — harus prioritas program substantif yang berdampak langsung pada OAP.'

Capaian: Pemda Papua Barat mendapat arahan langsung Wamendagri 2 kali; penggunaan Dana Otsus yang tidak tepat (pendataan kependudukan dari Otsus) diidentifikasi dan dikoreksi; tenggat penyelesaian RAP Tahap II diperkuat.

A.4 WORKSHOPPERCEPATAN PENYALURAN DANA OTSUS DAN DTI TAHAP II TA 2026 SERTA PENYUSUNAN RAP AWAL DANA OTSUS PAPUA TA 2027 MELALUI APLIKASI INTEROPERABILITAS BATCH 2

18–21 Agustus 2026 *GKN, Arfai Manokwari*





BP3OKP bersama Pokja mengikuti kegiatan intensif terkait pelaksanaan interoperabilitas Sistem Perencanaan dan Penganggaran (SIPPP-SIKD-SIPD) yang berdampak pada efektivitas penyelesaian RAP dan penetapan APBD, di GKN Manokwari.

Progres penyaluran: Seluruh daerah telah menyelesaikan Tahap I (30%). Tahap II (45%) telah tersalur ke 11 Pemda sebesar Rp7,14 Triliun (42,58% dari total alokasi) — namun tidak ada pemda yang memenuhi syarat tepat waktu. Persyaratan: laporan realisasi Tahap I minimal 50%, capaian output Tahap I 50%, dan RAP Perubahan final di SIKD.

BP3OKP: BP3OKP akan melakukan pendampingan teknis — memastikan OPD Papua Barat memahami dan mampu menggunakan sistem interoperabilitas SIPPP-SIKD-SIPD. BP3OKP menegaskan: 'Tidak ada pemda yang boleh kehilangan Dana Otsus karena alasan teknis administrasi — BP3OKP hadir sebagai pengarah, bukan hanya pengawas.'

Capaian: 11 Pemda Papua tersalur Tahap II; pemahaman interoperabilitas SIPPP-SIKD-SIPD meningkat; persyaratan RAP Perubahan final dipahami dan sedang diselesaikan seluruh Pemda Papua Barat.

3 ASPEK PELAKSANAAN

Akselerasi reaktivasi JKN 40.057 jiwa OAP, Festival Raimuti, dan program listrik Papua Terang.

L.1 Akselerasi Reaktivasi JKN — Deklarasi Kasumasa & 40.057 Jiwa OAP Papua Barat

3 Agustus 2026 *Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Manokwari*





Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Barat mengikuti kegiatan Akselerasi Reaktivasi Kepesertaan JKN bertema "Sinergi Papua Barat Sehat Melalui Program JKN" di Kelurahan Sanggeng, Manokwari, pada 3 Agustus 2026. Dihadiri Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 12, Wakil Bupati Manokwari, dan Gubernur Papua Barat.

Tiga agenda krusial terlaksana: (1) penandatanganan Addendum Rencana Kerja Pemprov Papua Barat–BPJS Kesehatan; (2) penandatanganan Deklarasi Kasumasa (Komitmen Pelayanan Bebas Pungli dan Tanpa Diskriminasi); (3) penyerahan simbolis dukungan reaktivasi kepesertaan JKN periode Juli–Desember 2026 bagi 40.057 jiwa masyarakat Papua Barat termasuk OAP.

BP3OKP: POKJA Papua Sehat memastikan 40.057 jiwa yang akan diaktivasi mencakup OAP yang terdampak deaktivasi data pusat yang salah. Deklarasi Kasumasa bukan sekadar seremonial — BP3OKP mendorong mekanisme pengawasan implementasi zero iur biaya di semua faskes Papua Barat secara konkret. Dan juga mendorong percepatan pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan bebas diskriminasi bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua khususnya OAP

✔ **Capaian:** Addendum Rencana Kerja Pemprov–BPJS Kesehatan ditandatangani; Deklarasi Kasumasa (bebas pungli, tanpa diskriminasi) resmi; 40.057 jiwa OAP Papua Barat diaktivasi JKN periode Juli–Desember 2026.

L.2 Program Papua Terang — Audiensi Kementerian ESDM: SHS & Potensi Energi Lokal

5 Agustus 2026 *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta*





Anggota BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat melakukan audiensi bersama Kementerian ESDM RI terkait Program Papua Terang, pada 5 Agustus 2026. Pertemuan menghasilkan tiga poin tindak lanjut: (1) pengarahan pembuatan surat resmi kepada kabupaten-kabupaten dan provinsi terkait pelaksanaan Program Papua Terang; (2) imbauan kepada setiap kabupaten di Papua untuk mengusulkan bantuan pemasangan listrik berbasis Solar Home System (SHS) serta potensi energi lokal (air dan angin); (3) usulan/proposal dari Bupati akan dihimpun BP3OKP untuk diteruskan ke Kementerian ESDM sebagai bahan pertimbangan program.

BP3OKP: BP3OKP menegaskan: 'Setiap kampung di Papua Barat berhak mendapat listrik — Solar Home System adalah solusi realistis untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan PLN.'

✔ **Capaian:** Mekanisme pengumpulan proposal Papua Terang melalui BP3OKP ditetapkan; imbauan SHS ke seluruh Bupati Papua Barat disampaikan; potensi energi air dan angin Papua Barat diidentifikasi sebagai prioritas.

Mobile Health Service-RS TERAPUNG BINTUNI



Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Barat mengikuti kegiatan Akselerasi Reaktivasi Kepesertaan JKN bertema "Sinergi Papua Barat Sehat Melalui Program JKN" di Kelurahan Sanggeng, Manokwari, pada 3 Agustus 2026. Dihadiri Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 12, Wakil Bupati Manokwari, dan Gubernur Papua Barat.

3 ASPEK PELAKSANAAN

SHEK BUMD Perseroda Pegaf, Festival Raimuti, dan penguatan JKN zero iur biaya.

L.3 SHEK Awal BUMD Perseroda Pegaf — 10 Sektor Strategis Bersama Tim Ahli UNIPA

6 Agustus 2026 *Aula Yosmar, Kabupaten Pegunungan Arfak*



Pokja Papua Produktif dan Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Barat menghadiri kegiatan SHEK awal BUMD Perseroda Pegaf bersama Pemkab Pegaf dan tim ahli UNIPA, di Aula Yosmar Pegaf, pada 6 Agustus 2026. Tim ahli UNIPA memaparkan 10 Sektor Strategis Potensial BUMD Perseroda Pegaf: (a) peternakan, (b) pertanian/hortikultura, (c) perkebunan, (d) kehutanan/rotan, (e) perikanan, (f) pariwisata, (g) jasa konstruksi, (h) perdagangan umum, (i) transportasi, (j) pertambangan. Sinkronisasi awal antara Pemkab Pegaf, tim ahli, dan BP3OKP dilaksanakan untuk memastikan Perseroda benar-benar berbasis potensi lokal OAP.

BP3OKP: BP3OKP mendorong agar 10 sektor BUMD Pegaf diprioritaskan berdasarkan kapasitas riil masyarakat Suku Sough: 'Jangan bangun BUMD yang terlihat bagus di atas kertas tapi tidak bisa dioperasikan oleh OAP Pegaf secara mandiri.' BP3OKP merekomendasikan memulai dari 2–3 sektor paling matang.

Capaian: 10 Sektor Strategis Potensial BUMD Perseroda Pegaf teridentifikasi; sinkronisasi awal Pemkab-Tim Ahli UNIPA-BP3OKP terlaksana; dasar pembentukan Perseroda yang berbasis potensi lokal OAP Pegaf diperkuat.

L.4 Rapat Strategis Penguatan Fasilitas Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Layanan kepada Peserta JKN Tanpa Iur Biaya menuju Papua Barat Sehat

10 Agustus 2026 *Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari*





Rapat koordinasi strategis penguatan fasilitas kesehatan JKN dan eliminasi iur biaya diselenggarakan pada 10 Agustus 2026, dihadiri Asisten III Sekda Pemprov Papua Barat, Kepala BPJS Cabang Manokwari, Kepala Dinkes Provinsi & Kabupaten, pimpinan RS/faskes (RSUD Prov., RSUD Manokwari, RSAL, RSU Dimara, RS Bhayangkara), serta Organisasi Profesi (IDI, Perdosni, POGI).

Pemerintah Daerah mengalokasikan Rp9 Miliar tambahan untuk memperluas cakupan PBI APBD. Deklarasi Kasumasa yang ditandatangani Gubernur, Ketua IDI, dan Deputi BPJS Wilayah XII mewajibkan seluruh faskes memberikan pelayanan ramah, cepat, profesional, tanpa diskriminasi, dan zero iur biaya bagi seluruh peserta JKN Papua Barat.

Dalam POKJA Papua Sehat Menekankan perlunya langkah luar biasa (extraordinary measures) untuk mengatasi tantangan kesehatan, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan bagi Orang Asli Papua (OAP).

BP3OKP: BP3OKP melalui POKJA Papua Sehat mendorong implementasi zero iur biaya secara terstruktur dengan mekanisme pengawasan yang jelas: Deklarasi Kasumasa harus ada sistem laporannya, bukan hanya tanda tangan seremonial..

Capaian: Rp9 Miliar tambahan dialokasikan untuk PBI APBD; Deklarasi Kasumasa zero iur biaya mengikat seluruh faskes Papua Barat

3 ASPEK PELAKSANAAN

Assessment RSUD Provinsi Papua Barat — kondisi nyata terungkap: dari obat hingga plafon yang hampir runtuh.

⚠ TEMUAN KRITIS — RSUD Provinsi Papua Barat: AC rusak, plafon hampir runtuh, BLUD Rp28 Miliar habis untuk gaji, keterbatasan obat dan alat kesehatan

L.5 **Assessment SHEK RSUD Provinsi Papua Barat — 3 Isu Kritis: Obat, Sarpras, Kesejahteraan Nakes**

12 Agustus 2026 *RSUD Provinsi Papua Barat, Manokwari*







BP3OKP (Pokja Papua Sehat, Cerdas, Produktif, dan POLHUKAM) melaksanakan Assessment SHEK pada RSUD Provinsi Papua Barat pada 12 Agustus 2026. Kondisi faktual yang terungkap Penyediaan sarana-prasarana, ketersediaan dokter, dan tenaga medis belum diperhatikan dengan optimal, sehingga pelayanan belum sampai secara maksimal ke masyarakat. Tiga isu strategis yang harus segera diselesaikan: ketersediaan obat dan BMHP, sarana prasarana, dan kesejahteraan tenaga kesehatan. BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menegaskan bahwa pembangunan sektor kesehatan di Provinsi Papua Barat melalui pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) harus berorientasi pada hasil nyata (*outcome*) yang langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

BP3OKP: BP3OKP Pokja Papua Sehat mendorong: (1) Pemda mengalihkan anggaran untuk maintenance sarpras darurat RSUD; (2) BLUD segera diaudit dan dioptimalisasi; (3) Tenaga kesehatan kontrak mendapat kepastian pembayaran gaji; (4) Persoalan status lahan dan aset pihak ketiga diselesaikan sesuai mekansime.

Mobile Health Service-RS TERAPUNG BINTUNI





Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Barat "perlunya langkah luar biasa (extraordinary measures) untuk mengatasi tantangan kesehatan, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan bagi Orang Asli Papua (OAP)."

3 ASPEK PELAKSANAAN

L.6 Festival Raimuti 2026 — "Pulau Raimuti: Surga Tropis Papua Barat"

6 Agustus 2026 *Dermaga Hj. Rahman Mansim, Manokwari*

POKJA Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Barat mewakili Ibu dalam menghadiri kegiatan Pembukaan Festival Raimuti Tahun 2026 dengan tema "Pulau Raimuti - Surga Tropis Papua Barat", yang diselenggarakan di Dermaga Haji Rahman Mansim, pada Kamis, 6 Agustus 2026. dihadiri oleh Gubernur Provinsi Papua Barat , Pandam XVIII/Kasuari serta Dinas Terkait. dengan rangkaian acara seperti Lomba Perahu dayung tradisional (12 Kontigen) dan Lomba Perahu Mensin Tradisional (12 Kontigen)

Kehadiran BP3OKP menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan potensi pariwisata bahari di Papua Barat, khususnya keindahan Pulau Raimuti sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang menyimpan pesona alam tropis yang memesona. Festival Raimuti diharapkan mampu menjadi ajang promosi pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, memperkenalkan kekayaan bahari dan budaya Papua Barat kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.
Semoga kegiatan ini terus memperkuat citra Papua Barat sebagai destinasi wisata unggulan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan.





L.7 Launching Chapter IRI Papua Barat — Ekonomi Hijau Berbasis Masyarakat Adat

13 Agustus 2026 *Hotel Aston Niu, Manokwari*

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta dukungan Chapter Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia Papua Barat untuk mengembangkan ekonomi hijau berbasis potensi lokal masyarakat adat dalam mendukung program Papua Barat Produktif.



BP3OKP: BP3OKP mendukung IRI sebagai mitra strategis ekonomi hijau: memastikan nilai karbon hutan adat Papua Barat dinikmati langsung oleh OAP, bukan hanya korporasi.

3 ASPEK PELAKSANAAN

SHEK Pabrik Pakan Ternak & Kolam Ikan Masni, HUT RI ke-81, dan audiensi Suku Sebiar.

L.8 SHEK Pabrik Pakan Ternak & Kolam Ikan Air Tawar — SP V Masni Manokwari

13 Agustus 2026 *Dinas Peternakan & DKP, Balai SP V Masni, Kab. Manokwari*





BP3OKP (seluruh Pokja) melaksanakan SHEK Assessment lapangandi dua lokasi Masni pada 13 Agustus 2026: (1) Pabrik Pakan Ternak — kapasitas produksi 1–3 ton/hari (rata-rata 2 ton/hari), dilengkapi mesin crumble, lahan 10 ha bebas sengketa adat. Kendala: daya listrik di bawah kebutuhan mesin produksi; kebutuhan bahan baku (jagung lokal) belum terpenuhi; dan mesin belum diuji coba operasional; (2) Kolam Ikan Air Tawar BBI — bibit ikan produksi lokal, identifikasi kebutuhan kapasitas produksi dan distribusi ke pasar.
Program Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) hasil kerja sama Dinas Peternakan, IPB, dan UNIPA juga dipaparkan sebagai upaya peningkatan kapasitas peternak OAP.

BP3OKP: BP3OKP memberikan rekomendasi konkret: (1) Pabrik pakan harus uji coba produksi sebelum akhir 2026 — tidak boleh lagi ada fasilitas yang dibangun tapi tidak beroperasi; (2) Bahan baku jagung lokal harus dijamin dari petani OAP Manokwari; (3) Kolam ikan BBI harus terintegrasi dengan dapur MBG sebagai pemasok ikan segar.

Capaian: Kondisi teknis Pabrik Pakan Ternak Masni dan Kolam Ikan BBI terverifikasi; kendala daya listrik dan bahan baku teridentifikasi; rekomendasi percepatan operasional tersusun.

L.9 Audiensi Masyarakat Suku Sebiar — Hak Ulayat, Sumur Minyak & Lingkungan

18 & 31 Agustus 2026 *Ruang Rapat BPP Lt. III, GKN Manokwari*







BP3OKP menerima dua audiensi dari Masyarakat Suku Sebiar pada 18 dan 31 Agustus 2026. Audiensi 31 Agustus mengungkap permasalahan mendasar yang selama bertahun-tahun tidak diselesaikan: (1) 9 sumur yang belum dibayar kompensasinya; (2) 13 sumur baru di Trend/Tranche 3 dengan pipa ±42 km (Kampung Tanggo–Weriagar) sudah masuk produksi tetapi belum pernah dibicarakan secara resmi; (3) Jalur pipa melewati batas perjanjian hingga masuk area perkampungan; (4) Banjir tahunan yang merendam sekolah Kampung Weriagar selama 5 tahun akibat limpasan air dari operasional perusahaan — dibiarkan oleh Pemda dan perusahaan; (5) Tumpang tindih klaim hak ulayat antar-marga.

BP3OKP: BP3OKP menjadi forum pertama yang mendengarkan dan mendokumentasikan seluruh keluhan Suku Sebiar secara formal dan terstruktur. BP3OKP menetapkan 5 tindak lanjut: teruskan ke Dinas ESDM, dorong pembayaran 9 sumur, fasilitasi dialog 13 sumur baru, koordinasi penanganan banjir, dan mediasi sengketa hak ulayat.

Capaian: Permasalahan Suku Sebiar (9 sumur belum dibayar, 13 sumur baru, pipa di luar batas, banjir 5 tahun) terdokumentasi resmi; 5 tindak lanjut BP3OKP ditetapkan;

3 ASPEK PELAKSANAAN

Pariwisata Amban Beach, HUT RI ke-81, NPCI, dan makna strategis pelaksanaan Agustus 2026.

L.10 Audiensi ASPEWA — Dukungan Papua Barat Produktif untuk Amban Beach Fest 2026

14 Agustus 2026 *Yenbeba, Amban Pantai, Manokwari*

Pokja Papua Produktif BP3OKP melakukan audiensi bersama Asosiasi Pecinta Wisata Air (ASPEWA) di Amban Pantai, Manokwari, untuk membahas permohonan dukungan Papua Barat Produktif pada penyelenggaraan Amban Beach Fest 2026. Festival ini merupakan momentum pengembangan ekonomi berbasis pariwisata air dan pantai di Manokwari.



BP3OKP: BP3OKP mendukung Amban Beach Fest sebagai platform ekonomi kreatif OAP: pariwisata air berbasis komunitas yang memberdayakan nelayan dan pengusaha lokal.

L.11 HUT Kemerdekaan RI ke-81

5 & 17 Agustus 2026 *Molas Reremi & GKN Arfai, Manokwari*

Pokja BP3OKP menghadiri Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-81 di GKN Arfai Manokwari



L.11 Musorprovlub NPCI Papua Barat

5 Agustus 2026 *Molas Reremi*

Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Barat mewakili Ibu dalam menghadiri undangan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Papua Barat, yang diselenggarakan di Molas, Reremi, pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Kehadiran ini menjadi bentuk dukungan dan perhatian terhadap pembinaan olahraga penyandang disabilitas di Provinsi Papua Barat, sekaligus wujud kepedulian terhadap kesetaraan akses dan kesempatan berprestasi bagi para atlet difabel Tanah Papua.

Musyawarah ini menjadi momentum penting bagi NPCI Provinsi Papua Barat dalam menentukan arah kepengurusan dan program kerja ke depan, guna mendukung pembinaan atlet paralimpik yang lebih terarah, terstruktur, dan berkelanjutan.

Semoga melalui forum ini, semangat inklusivitas dan kesetaraan terus terjaga, sehingga para atlet penyandang disabilitas di Papua Barat dapat terus berkarya dan mengharumkan nama daerah maupun bangsa di kancah olahraga nasional dan internasional.





percepatan KNMP Atiboi, dan tindak lanjut aspirasi masyarakat.

T.2 **Rapat Tim KNMP Atiboi Mesiri & Pendampingan Suku Sebiar — Tindak Lanjut Aspirasi**

22 Agustus 2026 *Rumah Dalving, Sowi 4 Pantai, Manokwari*

Pokja POLHUKAM BP3OKP melaksanakan rapat tim internal membahas Rencana Pembangunan Perumahan Nelayan Merah Putih Atiboi Mesiri, pada 22 Agustus 2026 di Sowi 4 Pantai Manokwari. Dasar pelaksanaan merujuk pada arahan Wakil Presiden RI.

BP3OKP mendorong percepatan rencana pembangunan Perumahan/Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Sowi IV Pantai, Kabupaten Manokwari. Doktor Ismail Sirfefa, menegaskan BP3OKP hadir untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat disinkronkan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat maupun daerah. Proyek ini mencakup lahan 22,5 ha yang disumbangkan keluarga Mansim Morai. Tim membahas progres AMDAL, izin lingkungan, dan status lahan yang harus diselesaikan sebelum konstruksi dimulai.



BP3OKP: BP3OKP memastikan KNMP Atiboi Mesiri berjalan sesuai prosedur: 'Tidak boleh ada 1.000 rumah dibangun tanpa AMDAL dan izin lingkungan yang lengkap.' BP3OKP berperan sebagai pengawal proses— memastikan setiap tahap ada dokumentasi formal dan persetujuan yang sah.

Capaian: Progres KNMP Atiboi Mesiri dievaluasi; persyaratan AMDAL dan izin lingkungan diidentifikasi sebagai prioritas sebelum konstruksi; BP3OKP menargetkan hasil pembahasan dan perkembangan rencana tersebut dapat segera disampaikan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut

Kelompok Kerja (Pokja)

Papua Sehat

Kelompok Kerja Papua Sehat — BP3OKP Papua Barat

Sasaran Misi: "Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk Papua Barat"

Pokja PAPUA SEHAT

Berdasarkan Assessment RSUD Provinsi, Reaktivasi JKN 40.057 jiwa, Rapat Faskes JKN, dan Monev TBC-HIV Agustus 2026.

1 Kendala Pembangunan

- RSUD Provinsi Papua Barat dalam kondisi darurat: AC rusak, plafon hampir runtuh, pasokan air dan listrik tidak stabil — infrastruktur RS yang memprihatinkan
- BLUD RSUD Provinsi Rp28 Miliar/tahun habis hanya untuk gaji pegawai kontrak — tidak ada anggaran tersisa untuk pemeliharaan dan operasional layanan
- 40.057 jiwa OAP Papua Barat kehilangan kepesertaan JKN dan baru diaktivasi Juli–Desember 2026 — menunjukkan kelemahan sistem data yang masih berlanjut
- Masih ada iur biaya ilegal di faskes Papua Barat meskipun Deklarasi Kasumasa sudah ditandatangani — implementasi di lapangan belum konsisten
- 1.172 kasus TBC per Juni 2026 dengan cakupan penemuan 38% — mayoritas kasus masih tersembunyi di komunitas
- Kekurangan dokter spesialis dan tenaga kesehatan OAP di kabupaten-kabupaten terpencil Papua Barat
- Layanan kesehatan bergerak (Kapal RS Terapung) baru menjangkau Distrik Tomu — masih banyak distrik pesisir yang belum terlayani
- Penyediaan sarana-prasarana, ketersediaan dokter, dan tenaga medis belum diperhatikan dengan optimal, sehingga pelayanan belum sampai secara maksimal ke masyarakat.

2 Permasalahan Daerah / Sumbatan

- RSUD Provinsi BLUD belum mandiri (tahun ke-6) — pendapatan habis untuk gaji, bukan layanan; perlu reformasi tata kelola BLUD fundamental
- Iur biaya ilegal di faskes Papua Barat belum tereliminasi sepenuhnya meskipun ada Deklarasi Kasumasa — perlu mekanisme pengawasan yang lebih kuat
- Dana Otsus bidang kesehatan tersendat: banyak Pemda belum selesaikan RAP sehingga alokasi tidak dapat dicairkan untuk layanan kesehatan
- Data JKN tidak akurat: 40.057 jiwa yang baru diaktivasi menunjukkan ribuan OAP sempat tidak memiliki jaminan kesehatan akibat kesalahan administrasi
- Obat dan BMHP di RSUD Provinsi terbatas — keterlambatan pengadaan mengganggu layanan pasien rawat inap
- Status lahan dan aset pihak ketiga di area RSUD Provinsi belum terselesaikan — menghambat ekspansi layanan
- Tenaga kesehatan kontrak tidak mendapat kepastian pembayaran gaji pasca September — berisiko mengundurkan diri dan memperparah kekurangan SDM

Pokja PAPUA SEHAT

Berdasarkan Assessment RSUD, Reaktivasi JKN, Rapat Faskes, Pendampingan Musrenbang, dan kegiatan kesehatan Agustus 2026.

3 Capaian / Kegiatan yang Sudah Dilakukan

- **Akselerasi Reaktivasi JKN (3 Agt): Addendum Rencana Kerja Pemprov–BPJS ditandatangani; Deklarasi Kasumasa (zero iur biaya, bebas pungli) resmi; 40.057 jiwa OAP Papua Barat diaktivasi JKN Juli–Desember 2026**
- Rapat Strategis Penguatan Faskes JKN (10 Agt): Rp9 Miliar tambahan dialokasikan untuk PBI APBD; seluruh faskes diwajibkan implementasi zero iur biaya; mekanisme pengaduan iur biaya ilegal ditetapkan
- Assessment SHEK RSUD Provinsi Papua Barat (12 Agt): 3 isu kritis terungkap
- Pendampingan Musrenbang Otsus 2026 (19–21 Agt): program kesehatan dalam Musrenbang Otsus dievaluasi — harus selaras RAPPP dan berbasis indikator outcome yang terukur
- Pendampingan Renstra/RPJMD/RAP Mansel & Bappeda (26–28 Agt): program Papua Sehat dalam RPJMD dan Renstra OPD Mansel diperkuat dan disinkronisasi
- Koordinasi percepatan penyaluran Dana Otsus Tahap II: BP3OKP memastikan alokasi Dana Otsus bidang kesehatan tidak terhambat oleh masalah administrasi
- Rakor KPK (3 Agt): komitmen tatakelola Dana Otsus termasuk alokasi bidang kesehatan dipantau bersama KPK
- ★ Kapal RS Terapung 'Bintuni Sehat' PERDANA beroperasi ke Distrik Tomu (15–16 Jul): layanan kesehatan hadir di wilayah pesisir terpencil yang sebelumnya tidak terjangkau — pemeriksaan umum, imunisasi, skrining TBC-HIV, konsultasi gizi, dan rujukan, Kapal Rumah Sakit terapung ini diusung oleh BP3OKP RI Provinsi Papua Barat melalui POKJA Papua Sehat mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

4 Peran BPP dalam Membuka Sumbatan

- Mengungkap kondisi darurat RSUD Provinsi secara formal — memungkinkan kebenaran yang selama ini tersembunyi menjadi agenda resmi yang tidak dapat diabaikan Pemprov
- Memastikan 40.057 jiwa OAP yang diaktivasi JKN mencakup yang paling rentan — mendorong mekanisme verifikasi aktif agar tidak ada OAP yang terlewat
- Mendorong implementasi Deklarasi Kasumasa secara konkret: merekomendasikan 'mystery patient' untuk uji ketaatan zero iur biaya di lapangan
- Mengadvokasi reformasi tata kelola BLUD RSUD Provinsi: pendapatan Rp28 Miliar tidak boleh lagi habis hanya untuk gaji — perlu subsidi pemda untuk operasional layanan dasar
- Memastikan program Papua Sehat dalam Musrenbang Otsus 2026 berbasis indikator outcome (stunting, UHH, ATM-K) bukan hanya kegiatan administratif
- Mengawal percepatan distribusi 392 tenaga medis OAP penugasan khusus yang masih belum tuntas terlaksana
- Mendorong penyelesaian status lahan dan aset pihak ketiga di RSUD Provinsi sebagai prasyarat ekspansi layanan

Pokja REKOMENDASI — PAPUA SEHAT

Rekomendasi prioritas pembangunan berdasarkan hasil kegiatan dan evaluasi lapangan Agustus 2026.

1. DARURAT RSUD Provinsi: alokasikan anggaran darurat untuk perbaikan sarpras (AC, plafon, air, listrik) dalam 30 hari — kondisi ini tidak boleh dibiarkan menahun
2. Reformasi BLUD RSUD Provinsi: Pemda wajib subsidi penggajian pegawai kontrak pasca September agar BLUD dapat fokus pada peningkatan layanan, bukan hanya bertahan hidup
3. Pastikan seluruh 40.057 jiwa OAP yang diaktivasi JKN mendapat informasi dan dapat mengakses layanan — zero iur biaya harus benar-benar dirasakan, bukan hanya di kertas
4. Implementasikan sistem pemantauan zero iur biaya: 'mystery patient' triwulanan di seluruh faskes Papua Barat; publikasikan hasilnya secara transparan
5. Percepat realisasi Dana Otsus bidang kesehatan: bantu Pemda Papua Barat menyelesaikan RAP agar alokasi kesehatan dapat dicairkan dan digunakan
6. Perkuat eliminasi TBC: selesaikan kelengkapan obat dan reagen di RSUD serta Puskesmas; implementasikan strategi TOSS tanpa ego sektoral
7. Selesaikan status lahan dan aset pihak ketiga di RSUD Provinsi Papua Barat sebelum akhir 2026 — ketidakpastian ini menghambat pengembangan layanan
8. Percepat distribusi 392 tenaga medis OAP penugasan khusus: evaluasi bulanan dan beri sanksi bagi faskes yang menolak atau tidak menempatkan tenaga yang telah ditugaskan

REKOMENDASI UMUM

Kendala dan Permasalahan

Berdasarkan Rakornis YPK, Audiensi YPK, Pendampingan Musrenbang, BUMD Pegaf, Assessment Masni, dan kegiatan pendidikan Agustus 2026.

1 Kendala Pembangunan

- RPJMD Kabupaten Manokwari masih di tahap rancangan awal — program Papua Cerdas dalam Renstra OPD belum tersinkronisasi dengan RAPPP
- Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak mendapatkan perhatian khusus dari Bappenas — keterlambatan dokumen perencanaan mengancam alokasi Dana Otsus bidang pendidikan
- 100 Kampung Baru Definitif Pegaf belum mendapat kode desa — anak-anak di kampung baru ini belum dapat didata dan difasilitasi layanan pendidikan formal
- BUMD Perseroda Pegaf yang akan menyokong ekonomi lokal baru pada tahap identifikasi 10 sektor — pendidikan vokasi OAP Pegaf masih jauh dari target
- Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) di Masni masih tahap awal — potensi vokasi pertanian-peternakan OAP belum termanfaatkan optimal

2 Permasalahan Daerah / Sumbatan

- Tingkat keselarasan Musrenbang Otsus Papua Barat dengan RAPPP baru 57,49% (evaluasi 19–21 Agt) — program pendidikan banyak yang tidak selaras dengan prioritas RAPPP
- Program Papua Cerdas dalam RPJMD Mansel dan Pegaf belum selesai disusun — keterlambatan ini langsung berdampak pada alokasi Dana Otsus bidang pendidikan 2027
- Anak-anak di wilayah konflik (Moskona, Sebiar) masih belum mendapat akses pendidikan yang stabil akibat situasi keamanan dan infrastruktur

Kendala dan Permasalahan

Berdasarkan Audiensi Suku Sebiar, SHEK BUMD Pegaf, SHEK Pabrik Pakan Masni, KNMP Atiboi, IRI Papua Barat, dan kegiatan produktif Agustus 2026.

1 Kendala Pembangunan / Isu Strategis

- Suku Sebiar: 9 sumur minyak yang belum dibayar kompensasinya; 13 sumur baru di Tranche 3 sudah produksi tanpa kesepakatan formal; pipa melampaui batas perjanjian masuk perkampungan
- Banjir tahunan 5 tahun di Kampung Weriagar akibat operasional perusahaan — sekolah terendam, tidak ada penanganan dari Pemda maupun perusahaan
- BUMD Perseroda Pegaf baru tahap identifikasi 10 sektor — kelembagaan ekonomi daerah baru membutuhkan 6–12 bulan lagi untuk operasional
- Pabrik Pakan Ternak Masni: kapasitas 2 ton/hari tapi belum beroperasi karena daya listrik di bawah kebutuhan mesin dan bahan baku jagung lokal belum tersedia
- Kolam Ikan BBI Masni belum terintegrasi dengan rantai pasok MBG — potensi pemasok lokal tidak dimanfaatkan
- KNMP Atiboi Mesiri: AMDAL dan izin lingkungan belum selesai — konstruksi 22,5 ha tidak dapat dimulai tanpa dokumen yang lengkap
- Ekonomi hijau berbasis hutan adat (IRI Papua Barat) baru dilaunching — implementasi konkret distribusi nilai karbon ke OAP masih jauh

2 Permasalahan Daerah / Sumbatan

- Suku Sebiar tidak memiliki akses ke forum hukum formal untuk mempermasalahkan hak ulayat dan kompensasi sumur minyak yang belum dibayar
- 13 sumur baru Tranche 3 yang sudah berproduksi tanpa kesepakatan dengan masyarakat adat adalah pelanggaran hak OAP yang tidak bisa diabaikan
- Bahan baku jagung lokal untuk Pabrik Pakan Ternak Masni belum diorganisir dari petani OAP — rantai pasok pertanian-peternakan belum terhubung
- IRI Papua Barat: nilai karbon hutan adat belum ada mekanisme distribusi yang jelas kepada masyarakat adat OAP — risiko korporasi mengambil manfaat tanpa OAP merasakannya
- KNMP Atiboi: status lahan 22,5 ha sumbangan keluarga Mansim Morai belum berkode resmi — dokumen legal harus diselesaikan sebelum konstruksi
- Ekonomi kreatif pariwisata (Festival Raimuti, Amban Beach Fest) masih bersifat event periodik — belum ada ekosistem ekonomi pariwisata yang berkelanjutan

Capaian dan Peran BP3OKP

Berdasarkan Rakornis YPK, Pendampingan Musrenbang, BUMD Pegaf, SPR Masni, dan kegiatan pendidikan Agustus 2026.

3 Capaian / Kegiatan yang Sudah Dilakukan

- SHEK BUMD Perseroda Pegaf (6 Agt): sektor vokasi dan pendidikan teknologi masuk dalam 10 sektor strategis BUMD Pegaf sebagai investasi SDM OAP jangka panjang
- Assessment Pabrik Pakan Ternak dan SPR Masni (13 Agt): program Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) hasil kerja sama IPB-UNIPA terdokumentasi; potensi pendidikan vokasi pertanian-peternakan OAP teridentifikasi
- Rakor Teknis Bappenas (5 Agt): Tim Asistensi Bappenas per kabupaten akan membantu memastikan program Papua Cerdas dalam RAPPP terimplementasi di daerah
- Rapat Tim Pengarah RAPPP Menara Bappenas (10 Agt): masukan costing program Papua Cerdas berbasis tipologi wilayah (pesisir vs pegunungan) disampaikan

4 Peran BPP dalam Membuka Sumbatan

- Mengadvokasi model pendidikan vokasi berbasis SPR (Sekolah Peternakan Rakyat) Masni sebagai model yang dapat direplikasi di kabupaten lain Papua Barat
- Mengawal percepatan penerbitan kode desa 100 Kampung Baru Pegaf dari Kemendagri agar anak-anak di kampung baru dapat didata dan difasilitasi layanan pendidikan
- Mendorong percepatan operasionalisasi BUMD Perseroda Pegaf dari 10 sektor strategis yang teridentifikasi — termasuk sektor pendidikan vokasi

Capaian dan Peran BP3OKP

Berdasarkan Audiensi Suku Sebiar, BUMD Pegaf, Papua Terang, Pabrik Pakan Masni, IRI, KNMP, dan kegiatan produktif Agustus 2026.

3 Capaian / Kegiatan yang Sudah Dilakukan

- Audiensi Suku Sebiar (18 & 31 Agt): 2 audiensi formal; seluruh permasalahan (9 sumur belum dibayar, 13 sumur baru, pipa melampaui batas, banjir 5 tahun) terdokumentasi resmi untuk pertama kalinya; 5 tindak lanjut BP3OKP ditetapkan
- SHEK Awal BUMD Perseroda Pegaf + Tim Ahli UNIPA (6 Agt): 10 Sektor Strategis Potensial teridentifikasi; sinkronisasi awal Pemkab-UNIPA-BP3OKP terlaksana
- Program Papua Terang ESDM (5 Agt): mekanisme pengumpulan proposal SHS dari seluruh Bupati Papua Barat melalui BP3OKP ditetapkan; potensi energi air dan angin Papua Barat diidentifikasi
- SHEK Pabrik Pakan Ternak & Kolam Ikan BBI Masni (13 Agt): kondisi teknis terverifikasi; kendala daya listrik dan bahan baku teridentifikasi; rekomendasi percepatan operasional tersusun
- Launching Chapter IRI Papua Barat (13 Agt): platform ekonomi hijau berbasis hutan adat masyarakat Papua Barat resmi terbentuk
- Rapat Tim KNMP Atiboi Mesiri (22 Agt): progres AMDAL dan izin lingkungan dievaluasi; mekanisme percepatan ditetapkan
- Festival Raimuti & Amban Beach Fest (6 & 14 Agt): BP3OKP mendukung pengembangan pariwisata air Papua Barat sebagai sumber ekonomi kreatif OAP

4 Peran BPP dalam Membuka Sumbatan

- Terus mengawal dan mendampingi Suku Sebiar: mendokumentasikan 9 sumur yang belum dibayar, 13 sumur baru tanpa kesepakatan, dan banjir 5 tahun — kemudian meneruskan ke ESDM dan perusahaan secara resmi
- Memfasilitasi SHEK BUMD Perseroda Pegaf bersama tim ahli UNIPA: mendorong BUMD dimulai dari 2–3 sektor paling matang, bukan semua 10 sektor sekaligus
- Mengagregasi proposal Papua Terang dari seluruh Bupati Papua Barat untuk disampaikan terkonsolidasi ke ESDM — efisiensi advokasi yang tidak bisa dilakukan Pemda secara sendiri-sendiri
- Mendorong rantai pasok Pabrik Pakan Ternak Masni: bahan baku jagung dari petani OAP Manokwari, produk pakan untuk peternak OAP — model ekonomi sirkular OAP
- Mengawal IRI Papua Barat agar nilai karbon hutan adat benar-benar sampai ke tangan masyarakat OAP — bukan hanya menjadi aset korporasi
- Memastikan KNMP Atiboi berjalan sesuai prosedur: AMDAL dan izin lingkungan selesai sebelum konstruksi; proses ini tidak dapat dipotong atas nama percepatan

REKOMENDASI UMUM

Rekomendasi prioritas pembangunan berdasarkan hasil kegiatan dan evaluasi lapangan Agustus 2026.

1 Tuntaskan hak Suku Sebiar: (1) bayar kompensasi 9 sumur yang tertunggak; (2) lakukan negosiasi resmi 13 sumur Tranche 3 sebelum produksi berlanjut; (3) selesaikan masalah banjir tahunan Kampung Weriagar dalam 60 hari

2 Dorong penandatanganan Perjanjian Kompensasi antara perusahaan dan Suku Sebiar dengan fasilitasi BP3OKP sebagai mediator resmi — libatkan ESDM dan Kemenkumham

3 Operasionalkan Pabrik Pakan Ternak Masni sebelum Desember 2026: selesaikan upgrade daya listrik, amankan kontrak bahan baku jagung dari petani OAP, dan uji coba produksi awal

4 Integrasikan Pabrik Pakan Masni dan Kolam Ikan BBI dengan rantai pasok MBG: petani dan peternak OAP Manokwari harus menjadi pemasok resmi dapur MBG Papua Barat

5 Operasionalkan BUMD Perseroda Pegaf mulai 2 sektor paling matang: pilih sektor yang paling realistis dari 10 sektor teridentifikasi berdasarkan kapasitas SDM dan modal yang tersedia

6 Pastikan nilai karbon IRI Papua Barat terdistribusi langsung ke komunitas masyarakat adat OAP melalui mekanisme yang transparan — bentuk komite penerima manfaat yang terdiri dari perwakilan masyarakat

7 Selesaikan AMDAL dan izin lingkungan KNMP Atiboi sebelum Oktober 2026 agar konstruksi dapat dimulai sesuai target — percepatan tanpa prosedur akan menghadapi masalah hukum

8 Masukkan Festival Raimuti dan Amban Beach Fest dalam kalender wisata nasional — advokasikan ke Kemenparekraf untuk dukungan anggaran dan promosi digital

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF